



**ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP
KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN ASET TETAP SEWAAN
BESERTA PENYUSUTANNYA TERHADAP PENYAJIAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PT MUSTIKA RATU TBK
TAHUN 2019-2022**

Skripsi

Dibuat Oleh:
Leny Nopia
022117139

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2024



**ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP
KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN ASET TETAP SEWAAN
BESERTA PENYUSUTANNYA TERHADAP PENYAJIAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PT MUSTIKA RATU TBK
TAHUN 2019-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE.,M.E.,Ph.D)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA.,
CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP
KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN ASET TETAP SEWAAN
BESERTA PENYUSUTANNYA TERHADAP PENYAJIAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PT MUSTIKA RATU TBK
TAHUN 2019-2022**

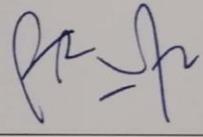
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Kamis Tanggal : 25/ Juli/ 2024

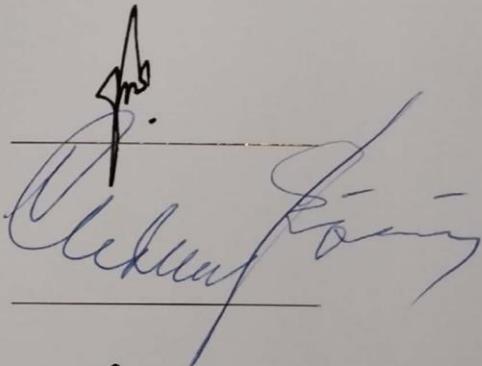
Leny Nopia
022117139

Menyetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Rochman Marota, SE., Ak., M.M)

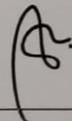


Anggota Penguji Sidang
(Agung Fajar Ilmiyono, SE., M. Ak., AWP.,
CTCP., CFA., CNPHRP.,CAP)



Ketua Komisi Pembimbing
(Chandra Pribadi, Ak, M.Si., CPSAK, CA, CPA)

Anggota Komisi Pembimbing
(Amelia Rahmi, S.E., M. Ak., AWP)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leny Nopia

NPM : 022117139

Judul Skripsi : ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP KEPEMILIKAN LANGSUNG DAN ASET TETAP SEWAAN BESERTA PENYUSUTANNYA TERHADAP PENYAJIAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT MUSTIKA RATU TBK TAHUN 2019-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 25 Juli 2024



Leny Nopia
022117139

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Pakuan, 2024
Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan

ABSTRAK

LENY NOPIA. 022117139. Akuntansi Perpajakan. Analisis Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Dan Aset tetap sewaan Beserta Penyusutannya Terhadap Penyajian Pajak Penghasilan Badan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022. Di bawah bimbingan. Ketua Komisi Pembimbing, **CHANDRA PRIBADI.** Anggota Komisi Pembimbing. **AMELIA RAHMI.**

Pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dalam negeri yang paling besar adalah pajak.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran bagaimana aset tetap yang dimiliki sendiri dan yang berasal dari sewa atau *lease* disajikan serta diungkapkan pada laporan keuangan. Penyusutan yang berasal dari aset tetap milik sendiri dan aset tetap sewaan mempengaruhi dalam perhitungan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, terhadap aset tetap dan penyusutanya baik milik sendiri maupun sewaan akan menjadi hal penting untuk disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada penelitian ini, bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam penyajian aset tetap kepemilikan langsung perusahaan mengikuti PSAK 16 dan perusahaan menggunakan PSAK 73 dalam menyajikan dan mengungkapkan aset tetap sewaan dan terdapat koreksi positif pada saat menghitung PPh badan karena terdapat beban penyusutan yang tidak bisa dibiayakan.

Kata Kunci : Penyajian, Pengungkapan, Aset Tetap, Pajak Penghasilan

PRAKATA

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian dengan **Analisis Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Kepemilikan Langsung Dan Aset Tetap Sewaan Beserta Penyusutannya Terhadap Penyajian Pajak Penghasilan Badan Pt Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022.**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi memperoleh nilai skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat banyak bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala keberkahan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi penelitian ini dapat berjalan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW atas segala syafaatnya serta sikap dan sifat yang menjadi panutan bagi penulis agar menjadi lebih baik.
3. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa, memberikan motivasi, memberikan nasihat, dukungan material, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga.
4. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., M.E., Ph.d selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang sangat penulis hormati.
5. Dr. Retno Endah Martanti Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang sangat penulis hormati.
6. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M. Acc. selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang sangat penulis hormati.
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang sangat penulis hormati.
8. Bapak Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CPA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengetahuan, motivasi,

dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan baik.

9. Ibu Amelia Rahmi, S.E., M. Ak., AWP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
11. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ketulusan untuk membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
12. Keluargaku yang telah memberikan semangat dan dukungan materil selama perkuliahan.
13. Teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Perpajakan 2017 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini.
14. Teman-teman Akuntansi kelas D dan C yang melengkapi perjalanan dari awal kuliah hingga saat ini.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya di masa yang akan datang.

Bogor, 25 Juli 2024

Penulis



Leny Nopia

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perpajakan	10
2.1.1 Definisi Perpajakan	10
2.2 Akuntansi Aset Tetap	11
2.2.1 Definisi Aset Tetap	11
2.2.2 Klasifikasi Aset Tetap Akuntansi dan Perpajakan	12
2.2.3 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	12
2.3 Penyusutan Aset Tetap	15
2.3.1 Definisi Penyusutan	15
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Penyusutan	16
2.4 Pajak Penghasilan	17
2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan	17
2.4.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	18
2.5 Pajak Penghasilan Penyusutan Aset Tetap	21
2.5.1 Golongan Aset Tetap	21
2.6 Pajak Penghasilan Badan	23
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	38

	3.2.1	Objek Penelitian.....	38
	3.2.2	Unit Analisis	38
	3.2.3	Lokasi Penelitian.....	38
	3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	38
	3.4	Operasionalisasi Variabel	39
	3.5	Metode Pengumpulan Data.....	39
	3.6	Metode Analisis Data/ Pengolahan Data	39
	3.6.1	Analisis Deskriptif Kualitatif.....	39
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	4.1	Gambaran Singkat Lokasi Penelitian.....	41
	4.1.1	Sejarah Singkat PT Mustika Ratu Tbk.....	41
	4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	41
	4.2.1	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap dan Penyusutannya Pada PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022.....	41
	4.2.2	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Sewaan dan Penyusutannya Berdasarkan PSAK 73 PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022.....	52
	4.2.3	Penyajian dan Pengungkapan Pajak Penghasilan Badan pada PT Mustika Ratu Tbk	56
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN	61
	5.1	Kesimpulan	61
	5.2	Saran	61
		DAFTAR PUSTAKA	62
		DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2019.....	3
Tabel 1.2	Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2020.....	4
Tabel 1.3	Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2021.....	4
Tabel 1.4	Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2022.....	4
Tabel 1.5	Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019.....	5
Tabel 1.6	Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020.....	5
Tabel 1.7	Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021.....	6
Tabel 1.8	Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022.....	6
Tabel 1.9	Beban (Manfaat) Pajak dan Laba Sebelum Pajak.....	7
Tabel 2.1	Kelompok Harta Berwujud.....	22
Tabel 2.2	Peneliti Terdahulu.....	30
Tabel 2.3	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	33
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	39
Tabel 4.1	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	42
Tabel 4.2	Perbandingan Penyajian Aset Tetap oleh Perusahaan dengan PSAK No.16.....	43
Tabel 4.3	Penyajian Aset pada Laporan Posisi Keuangan PT Mustika Ratu Per 31 Desember Tahun 2019-2020.....	43
Tabel 4.4	Penyajian Aset Tetap dan Aset Tetap Sewaan PT Mustika Ratu per 31 Desember 2020 dan 2019.....	44
Tabel 4.5	Penyajian Aset pada Laporan Posisi Keuangan PT Mustika Ratu Per 31.....	44
Tabel 4.6	Penyajian Aset Tetap dan Aset Tetap Sewaan PT Mustika Ratu per 31 Desember 2021 dan 2022.....	45
Tabel 4.7	Rincian Biaya Perolehan Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk.....	46
Tabel 4.8	Rincian Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019.....	46
Tabel 4.9	Rincian Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2020.....	47
Tabel 4.10	Rincian Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2020.....	47
Tabel 4.11	Rincian Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2021.....	48
Tabel 4.12	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2021.....	48
Tabel 4.13	Rincian Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2022.....	49
Tabel 4.14	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk.....	49
Tabel 4.15	Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap Perusahaan dengan PSAK No.16.....	50
Tabel 4.16	Tarif Penyusutan.....	51
Tabel 4.17	Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung Tahun 2019.....	51

Tabel 4.18	Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung Tahun 2020.....	51
Tabel 4.19	Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung 2021	52
Tabel 4.20	Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung Tahun 2022.....	52
Tabel 4.21	Rincian Sewa	55
Tabel 4.22	Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019 ...	55
Tabel 4.23	Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2020 ...	55
Tabel 4.24	Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2021 ...	55
Tabel 4.25	Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2022 ...	56
Tabel 4.26	Aset Pajak PT Mustika Ratu Tahun 2019-2020	58
Tabel 4.27	Aset Pajak PT Mustika Ratu Tahun 2021-2022	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Trend Presentase Nilai Total Aset Tetap Terhadap Total Aset PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019 - 2022	5
Gambar 1.2	Trend Persentase Total Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terhadap Total Nilai Aset Tetap.....	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1	Logo Perusahaan	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Pengesahan Seminar Skripsi Penelitian	63
Lampiran 2	Lembar Persetujuan Seminar Skripsi Penelitian	64
Lampiran 3	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2019	65
Lampiran 4	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2019	67
Lampiran 5	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2020	68
Lampiran 6	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2020	70
Lampiran 7	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2021	71
Lampiran 8	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2021	73
Lampiran 9	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2022	74
Lampiran 10	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2022	76
Lampiran 11	Aset Tetap Pada Laporan Keuangan	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dalam negeri yang paling besar adalah pajak.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu subjek pajak di Indonesia, perusahaan wajib membayar pajak kepada negara dan daerah tempatnya beroperasi. Umumnya, perusahaan dikenakan beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Namun pada perusahaan dengan aktivitas bisnis tertentu, dapat dikenakan PPh Pasal 22, PPh Pasal 24, PPh Pasal 15, dan PPh Final UMKM.

Pajak Penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Taxmates. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Beberapa Badan Usaha itu seperti bentuk badan hukum Perusahaan Terbatas (PT), atau Perusahaan Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya. Sedangkan Pajak penghasilan yang dibebankan kepada perseorangan maka meliputi upah, dan gaji, serta tunjangan, juga honorarium, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa, atau kegiatan, atau jabatan ataupun pekerjaan, yakni segala bentuk penghasilan. PPh diatur dalam beberapa pasal UU terkait perpajakan. Mengenai pajak penghasilan perseorangan tersebut diatur pada pasal 21.

Setiap entitas atau perusahaan, wajib membayar pajak kepada negara sehingga laporan keuangan harus dibedakan untuk kepentingan pajak dan komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Beban pada akuntansi komersial didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (IAI, 2007:13). Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Perbedaannya terletak pada adanya manfaat ekonomi di masa mendatang untuk biaya. Pada akuntansi pajak beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Akan tetapi, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan pada akuntansi fiskal biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*).

PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan industri manufaktur yang memiliki aset tetap cukup besar. Oleh karena itu, memungkinkan untuk mempertimbangkan metode penyusutan lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan. Kebijakan pajak PT Mustika Ratu Tbk dalam menghitung penyusutan masih menggunakan metode garis lurus. Pemilihan metode penyusutan aset tetap yang tepat penting dilakukan karena metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya penyusutan berbeda, besarnya beban penyusutan aset tetap akan mempengaruhi beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Selain itu penyusutan dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk menerapkan metode penyusutan aset tetap yang tepat agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. PT Mustika Ratu Tbk perlu mencari alternatif dan mempertimbangkan metode penyusutan lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka perencanaan pajak perusahaan agar menghasilkan pembayaran beban pajak penghasilan badan seefisien mungkin. Dari sisi perpajakan dalam ketentuan perpajakan, penyusutan aset tetap ini mempunyai peranan penting di dalam strategi perencanaan pajak untuk dapat mengefisienkan beban pajak, dalam pemilihan metode penyusutan aset tetap haruslah tepat.

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dapat mendukung keberhasilan usaha dari perusahaan. Dengan aset tetap yang memadai, kelancaran usaha dan aktivitas operasional dari suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanpa aset tetap memadai, aktivitas perusahaan akan terganggu sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa aset tetap merupakan harga milik perusahaan yang material dan diperoleh bukan dengan tujuan diperjualbelikan melainkan digunakan untuk kegiatan

operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode.

Perusahaan selain memperoleh aset tetapnya dengan melakukan investasi berupa kepemilikan langsung, juga dapat memperoleh aset tetap operasinya melalui sewa. Aset tetap yang diperoleh secara sewa memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dengan aset tetap secara umum dikarenakan terdapat beban dan liabilitas yang timbul dari perolehan aset tersebut. Beban penyusutan terhadap aset tetap sewaan dari sisi perpajakan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pada laporan keuangan perlu disajikan serta diungkapkan dengan tepat terkait dengan aset tetap kepemilikan langsung (PSAK 16) dan aset tetap sewaan (PSAK 73) untuk memperjelas status aset tersebut dan kaitannya dengan besaran Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tentang Aset Tetap. PSAK 16 paragraf 06 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Salah satu isu utama dalam aset tetap adalah penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis nilai aset tetap menjadi beban. Beban penyusutan adalah beban yang tidak menimbulkan pengeluaran kas. Penyusutan tidak juga menimbulkan penerimaan kas. Disinilah perlunya kembali diingat tentang konsep beban. Jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akun kontra aset bernama Akumulasi Penyusutan atau penyesihan untuk penyusutan. PSAK 16 paragraf 55 menyebutkan bahwa penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

Berikut adalah Nilai Total Aset Tetap yang terdiri dari aset tetap kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan pada PT Mustika Ratu disajikan tahun 2019 sampai dengan 2022 pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2019

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Aset Kepemilikan Langsung	186.166.693.771	1.831.463.023	8.575.066.979	(2.369.484.372)	177.053.605.443
Total Aset tetap sewaan	--	--	--	1.480.000.000	1.480.000.000
Total Aset Tetap	186.166.693.771	1.831.463.023	8.575.066.979	(889.484.372)	178.533.605.443
Total Aset	--	--	--	--	532.762.947.995
Persentase	--	--	--	--	34%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Tabel 1.2 Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2020

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Aset Kepemilikan Langsung	177.053.605.443	6.132.990.474	2.177.510.458	876.216.416	181.885.301.875
Total Aset tetap sewaan	1.480.000.000	--	--	--	1.480.000.000
Total Aset Tetap	178.533.605.443	6.132.990.474	2.177.510.458	876.216.416	183.365.301.875
Total Aset	--	--	--	--	559.795.937.451
Persentase	--	--	--	--	33%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Tabel 1.3 Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2021

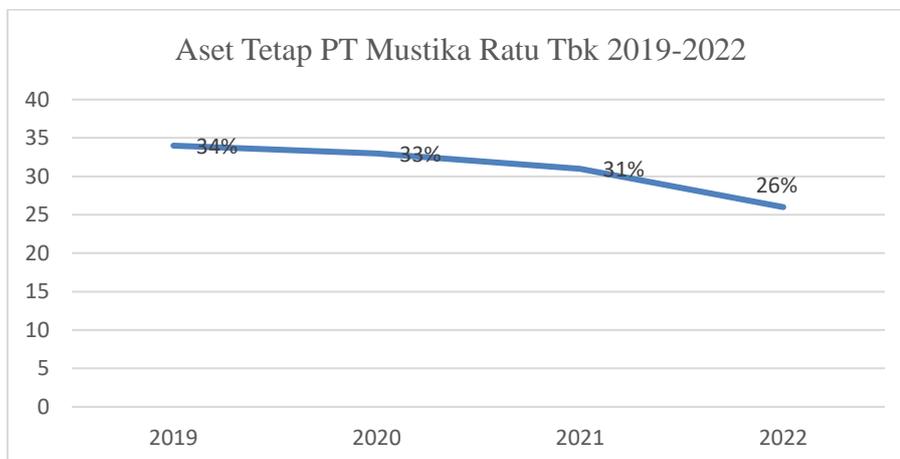
Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Aset Kepemilikan Langsung	181.885.301.875	1.966.157.371	5.294.030.348	779.371.399	179.336.800.297
Total Aset tetap sewaan	1.480.000.000	1.020.912.540	--	(1.480.000.000)	1.020.912.540
Total	183.365.301.875	2.987.069.911	5.294.030.348	(700.628.601)	180.357.712.837
Total Aset	--	--	--	--	578.260.975.588
Persentase	--	--	--	--	31%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Tabel 1.4 Nilai Total Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk 2022

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Kepemilikan Langsung	179.336.800.297	553.129.445	657.096.211	1.303.824.135	180.536.657.666
Total Aset tetap sewaan	1.020.912.540	--	--	--	1.020.912.540
Total Aset Tetap	180.357.712.837	553.129.445	657.096.211	1.303.824.135	181.557.570.206
Total Aset	--	--	--	--	694.780.597.799
Persentase	--	--	--	--	26%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk



Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Gambar 1.1 Trend Presentase Nilai Total Aset Tetap Terhadap Total Aset PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019 - 2022

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase aset tetap pada tahun 2019 sebesar 34%, berkurang di tahun 2020 menjadi 33% dan nilai aset tetap di tahun 2021 seperti 2020 sebesar 31% dan aset tetap berkurang kembali di tahun 2022 menjadi 26%. Berikut adalah total nilai penyusutan aset tetap PT Mustika Ratu Tbk periode 2019-2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Penyusutan Kepemilikan Langsung	126.422.597.902	6.197.964.950	8.575.066.979	-594.036.620	123.451.459.253
Total Penyusutan Sewa Kepemilikan Langsung	--	--	--	209.666.667	209.666.667
Total Penyusutan	126.422.597.902	6.197.964.950	8.575.066.979	-384.369.953	123.661.125.920
Total Aset tetap	186.166.693.771	--	--	--	178.533.605.443
Persentase Total Penyusutan terhadap Total Aset	--	--	--	--	69%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Tabel 1.6 Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Penyusutan Kepemilikan Langsung	123.451.459.253	5.377.575.499	2.177.510.458	391.096.547	127.042.620.841
Total Penyusutan Sewa Kepemilikan Langsung	209.666.667	147.999.996	--	--	357.666.663
Total Penyusutan	123.661.125.920	5.525.575.495	2.177.510.458	391.096.547	127.400.287.504
Total Aset Tetap	178.533.605.443	--	--	--	183.365.301.875
Persentase Total Penyusutan terhadap Total Aset Tetap	--	--	--	--	69%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Tabel 1.7 Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021

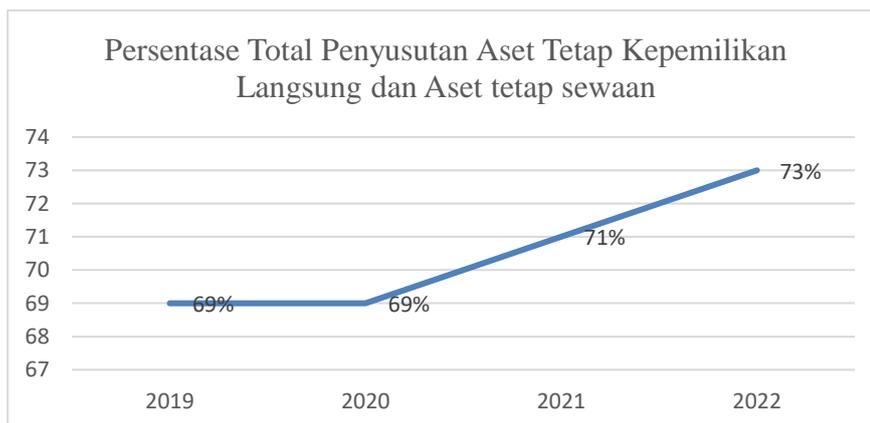
Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Penyusutan Kepemilikan Langsung	127.042.620.841	5.608.093.913	5.294.030.348	108.610.584	127.465.294.990
Total Penyusutan Sewa Kepemilikan Langsung	357.666.663	122.476.934	0	-431.666.661	48.476.936
Total Penyusutan	127.400.287.504	5.730.570.847	5.294.030.348	-323.056.077	127.513.771.926
Total Aset Tetap	183.365.301.875	--	--	--	180.357.712.837
Persentase Total Penyusutan terhadap Total Aset Tetap	--	--	--	--	71%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Tabel 1.8 Total Nilai Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Total Penyusutan Kepemilikan Langsung	127.465.294.990	4.598.352.419	618.096.211	627.140.979	132.072.692.177
Total Penyusutan Sewa Kepemilikan Langsung	48.476.936	170.152.090	--	--	218.629.026
Total Penyusutan	127.513.771.926	4.768.504.509	618.096.211	627.140.979	132.291.321.203
Total Aset Tetap	180.357.712.837	--	--	--	181.557.570.206
Persentase Total Penyusutan terhadap Total Aset Tetap	--	--	--	--	73%

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk



Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Gambar 1.2 Trend Persentase Total Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Terhadap Total Nilai Aset Tetap

Berdasarkan grafik di atas, disimpulkan bahwa persentase akumulasi penyusutan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 69% di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 71% dan pada tahun 2022 menjadi 73%

Tabel 1.9 Beban (Manfaat) Pajak dan Laba Sebelum Pajak

Tahun	Beban (Manfaat) Pajak Rp	Laba Sebelum Pajak Rp
2019	(2.297.701.551)	131.836.668
2020	(12.945.883.164)	(6.766.719.891)
2021	(7.231.151.818)	7.588.661.369
2022	18.374.486.159	49.437.547.978

Sumber: Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tentang Aset Tetap. PSAK 16 paragraf 06 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengakuan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran saat pengakuan aset tetap memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan yang meliputi (a) harga perolehannya (b) biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Pengukuran setelah pengakuan entitas dapat memilih antar model biaya adalah model yang selama ini kita kenal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, atau dengan metode revaluasi setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan Mayangsari dan Nurjanah (2018).

PSAK 73 mulai berlaku bagi semua perusahaan yang ada di Indonesia mulai tahun 2020. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 dan ISAK 8. Di dalam PSAK 73, hampir semua bentuk sewa merupakan sewa pembiayaan kecuali untuk sewa jangka pendek dan yang memiliki nilai pendasar rendah (Ahalik, 2019). Dampak dari berlakunya PSAK 73 terhadap laporan keuangan akan berbeda untuk setiap perusahaan, namun bagi perusahaan yang memiliki kontrak sewa yang besar akan memiliki dampak yang besar.

Hubungan penyusutan aset tetap terhadap pajak yang akan di bayar terhadap pajak penghasilan badan akan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar, karena penyusutan aset tetap akan menjadi unsur biaya pengurang penghasilan bruto (*deductible*) untuk mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Manajemen melalui perencanaan pajak berupaya untuk meminimumkan kewajiban

pajak secara legal dan mengefisienkan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meminimalkan biaya pajak secara legal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Kepemilikan Langsung Dan Aset Tetap Sewaan Beserta Penyusutannya Terhadap Penyajian Pajak Penghasilan Badan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian dan pengungkapan menyatakan bahwa perusahaan memiliki aset tetap sesuai dengan laporan keuangan yang berasal dari kepemilikan langsung dan sewa
2. Terdapat penyajian dan pengungkapan penyusutan aset tetap sewaan pada peralatan pabrik pada tahun 2019-2020 dan kendaraan di tahun 2021 dan tahun 2022.
3. Terdapat koreksi fiskal untuk beban penyusutan yang berasal dari beban penyusutan kepemilikan langsung dan beban penyusutan sewaan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung dan penyusutannya berdasarkan PSAK-16 pada PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap sewaan dan penyusutannya berdasarkan PSAK 73 PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022?
3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan Pajak Penghasilan Badan pada PT Mustika Ratu Tbk berkaitan dengan beban penyusutan aset tetap kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan penulisan dalam skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai analisis penyajian dan pengungkapan aset tetap dan aset tetap sewaan beserta penyusutannya dan perhitungan hal tersebut pada Pajak Penghasilan Badan PT Mustika Ratu Tbk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengujian dan mendapatkan bukti atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung dan aset penyusutannya berdasarkan PSAK-16 pada PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan aset tetap sewaan dan penyusutannya berdasarkan PSAK 73 PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022?
3. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan Pajak Penghasilan Badan pada PT Mustika Ratu Tbk berkaitan dengan beban penyusutan aset tetap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
Bagi penulis, dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan kuliah dengan kenyataan yang ada diperusahaan dan juga menambah pengetahuan yang sifatnya baru, khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Kegunaan Praktis
Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan PSAK 16 dan PSAK 73 di perusahaan, yang dapat berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan yang mempengaruhi kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1. Definisi Perpajakan

UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dasar perhitungan besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Penghasilan Kena Pajak yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan.

Djajadiningrat (2016) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Feldmann (2017) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Resmi, (2017), ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntungkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Ada dua fungsi pajak Resmi (2017), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi.

2.2. Akuntansi Aset Tetap

2.2.1 Definisi Aset Tetap

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Untuk mengoperasikan kegiatan usahanya, perusahaan menggunakan berbagai macam peralatan, atau alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Peralatan yang digunakan ini berupa peralatan, mesin-mesin, bangunan, tanah dan sebagainya yang disebut sebagai aset tetap.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 (Revisi 2011) dinyatakan bahwa aset tetap memiliki pengertian sebagai berikut :

Aset tetap adalah aset berwujud (*tangible assets*) yang :

1. Dimilik untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
2. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode

Menurut Pohan (2017), aset tetap (*fixed assets*) adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya, dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang. Aset tetap merupakan aset yang berwujud (*tangible asset*), berbeda dengan aset tidak berwujud (*intangible assets*) dimana tidak memiliki wujud fisik dan dihasilkan sebagai akibat dari sebuah kontrak hukum, ekonomi, maupun kontrak sosial.

Dalam syarat fiskal bersumber pada Pasal 9 ayat (2) UU Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Pajak pemasukan, peninggalan senantiasa ialah harta berwujud yang dipunyai serta pula digunakan uat dapat memperoleh, menagih, serta memelihara pemasukan yang mempunyai masa khasiat lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan buat dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan lewat penyusutan ataupun amortisasi sebagaimana diartikan dalam pasal 11 ataupun 11A.

Menurut Hafsah, dkk (2016) aset tetap adalah aset-aset yang memiliki wujud, yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan maksud untuk dijual.

Berdasarkan definisi di atas bisa disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang menjadi hak milik perusahaan ,jangka waktu penggunaannya lebih dari satu tahun, diperoleh dalam bentuk siap digunakan atau dibentuk terlebih dahulu digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali kepada pelanggan.

2.2.2 Klasifikasi Aset Tetap Akuntansi dan Perpajakan

Gunadi (2009) menyatakan bahwa ketentuan perpajakan aset tetap yang dapat disusutkan akan dikelompokkan menjadi :

1. Bukan bangunan:
 - a. Kelompok 1 yaitu aset yang mempunyai masa manfaat <4 tahun.
 - b. Kelompok 2 yaitu aset yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
 - c. Kelompok 3 yaitu aset yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
 - d. Kelompok 4 yaitu aset yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.
2. Bangunan:
 - a. Permanen, yaitu aset yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.
 - b. Tidak permanen, yaitu aset yang mempunyai masa manfaat 10 tahun. Lalu untuk aset tidak berwujud, untuk perhitungan amortisasinya dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan pasal 11A UU No. 11 tahun 2020 harta tidak berwujud dikelompokkan sama dengan aset berwujud bukan bangunan, yaitu menjadi kelompok 1,2,3, dan 4. Dengan masa manfaat yang sama yaitu 4,8,16, dan 20 tahun, hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud serta memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud.

2.2.3 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Pengakuan Aset Tetap

Untuk mendapatkan aset tetap maka perusahaan wajib mengeluarkan biaya perolehan yang digunakan untuk memperoleh aset tetap. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan

untuk mendapatkan aset dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aset tetap siap untuk digunakan. Biaya perolehan aset tetap meliputi :

- a. Harga perolehannya termasuk Bea Impor dan Pajak Pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya.
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Menurut Sumarsan (2015) dalam akuntansi aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak hanya untuk diperjualbelikan. Harga perolehan aset tetap meliputi harga faktur dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut sampai dapat digunakan dalam hubungannya dengan kepemilikan sampai aset tetap tersebut siap digunakan dicatat sebagai harga perolehan. Aset tetap dapat diakui jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi dari aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. Syarat ini terpenuhi apabila kepastian tingkat aliran manfaat ekonomi pada saat pengakuan awal atau apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima oleh perusahaan
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diperoleh/diketahui secara andal. Perolehan aset tetap akan mudah dilihat akibat adanya transaksi eksternal, pengertian secara eksternal dalam hal ini adalah dapat diperbandingkan dengan transaksi pembelian aset yang sama oleh perusahaan lain.

2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang mempengaruhi syarat pengakuan sebagai aset tetap diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan.

- a. Jika suatu aset tetap diakui maka manajemen harus menentukan kebijakan akuntansi atas perolehan aset yang dimaksud. Perusahaan harus memilih apakah menggunakan model revaluasi atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya.
- b. Jika dalam model revaluasi (penarikan/penilaian kembali) aset tetap dicatat pada jumlah revaluasinya artinya nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi semua akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan atau kenaikan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Sementara itu dalam

model biaya aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan semua akumulasi rugi penurunan nilai aset jika ada.

- c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap, selama aset tetap beroperasi, perusahaan tidak dapat menghindari pengeluaran-pengeluaran yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada aset tersebut, seperti biaya pemeliharaan, biaya perbankan, dan biaya penambahan.

Kemudian terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu sebagai berikut:

- a. Membeli secara tunai
Jika aset tetap diperoleh dengan secara tunai, maka harga perolehannya meliputi seluruh biaya yang terjadi sampai aset tersebut tiba di tempat dan siap untuk digunakan. Jika dalam hal ini terdapat potongan aset maka potongan tersebut harus dikurangkan dari harga perolehan atau harga faktur aset tetap bersangkutan. Dan jika bila dalam suatu pembelian aset tetap diperoleh lebih dari satu jenis aset aka harga perolehan aset tersebut harus dialokasikan pada masing-masing aset secara terpisah.
- b. Membeli secara kredit
Ada kala perusahaan tidak memiliki dan yang cukup untuk membeli aset tetap secara tunai, maka sebab itu perusahaan dapat memperoleh dengan cara mengangsur atau membeli secara kredit. Oleh karena itu pembayaran untuk pembelian aset dapat dilakukan dengan pembayaran secara mengangsur cicilan pokok ditambah bunga atas utang yang timbul sebagai akibat dari pembelian kredit.
- c. Menerbitkan surat-surat berharga (obligasi, saham, dan surat berharga lainnya)
Suatu aset ada kalanya diperoleh dengan menerbitkan saham (ekuitas). Aset tetap yang diperoleh dengan menerbitkan surat-surat berharga baik yang berupa obligasi maupun saham. Nilai harga perolehan ditentukan dengan berdasarkan nilai pasar yang wajar atas surat-surat berharga tersebut. Apabila surat-surat berharga dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal yang telah ditetapkan maka perkiraan agio premium atau disagio/diskonto harus diperlakukan sebagai penambah atau pengurang terhadap nilai nominal
- d. Pertukaran dengan aset lain
Menilai suatu aset dengan nilai wajar yang ditukarkan akan lebih konsisten dengan konvensi dibandingkan dengan biaya historis. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan cara pertukaran aset lama yang dimiliki perusahaan dengan aset baru milik perusahaan lain baik pertukaran aset yang sejenis maupun tidak sejenis.

Sama hal dengan perolehan aset tetap dengan penerbitan surat-surat berharga apabila transaksi semacam ini terjadi maka harus dicatat sebesar dengan harga pasar

yang wajar dari harga aset tersebut. Dengan begini, apabila pertukaran yang terjadi adalah pertukaran aset yang tidak sama jenis maka laba atau ruginya pertukaran tersebut harus diakui, apabila terdapat perbedaan dengan aset lain dan juga nilai pasar yang diserahkan. Sedangkan jika pertukaran aset sejenis maka laba atau ruginya pertukaran tersebut tidak akan diakui.

3. Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Menurut Martini (2016) aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan (laporan perubahan ekuitas) dibagian aset tidak lancar. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan.

4. Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Suwardjono (2014) pengungkapan secara konseptual merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statmen* keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode:
 - 1) Penambahan
 - 2) Pelepasan
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya
- c. Metode penyusutan yang digunakan
- d. Mur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- e. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode

2.3 Penyusutan Aset Tetap

2.3.1 Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Aset tetap kecuali tanah atau hak atas tanah pada waktu digunakan dalam operasi perusahaan yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, kegunaannya akan semakin menurun. Penurunan kegunaan aset tetap tersebut mengakibatkan nilainya harus disusutkan. Proses ini dinamakan penyusutan untuk aset tetap berwujud yang dapat diganti.

Tujuan suatu perusahaan menghitung jumlah penyusutan dari aset yang dimilikinya adalah agar tercapainya prinsip pengaitan (*matching principle*), yaitu mengaitkan pendapat pada satu periode akuntansi dengan biaya dari barang-barang dan jasa yang dikonsumsi guna menghasilkan pendapatan serta memperhitungkan penurunan kegiatan aset tetap karena pemakaian.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 11 Tahun 2020 pada pasal 11, penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Menurut PSAK No. 16 paragraf 17 menyatakan definisi penyusutan adalah sebagai berikut: “penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menurut Mardjani (2015) “penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Alokasi biaya aktiva dilakukan membukanya ke rekening biaya (debit) dan rekening akumulasi penyusutan (kredit). Rekening biaya akan tampak dalam perhitungan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan terlihat dalam neraca. Perubahan harga aset tetap yang terjadi di pasar, tidak perlu dicatat dalam pembukuan perusahaan karena aset tetap dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan untuk dijual kembali. Oleh karena itu nilai buku aset (harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi), biasanya sangat berbeda dengan harga pasar aset yang bersangkutan.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Penyusutan

Menurut Baridwan (2010) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan antara penurunan nilai aset dengan penggunaan dan waktu
2. Pengaruh keusangan
3. Pola biaya dan pemeliharaan
4. Tingkat efisiensi operasi aset yang bersangkutan
5. Kemungkinan perubahan dalam pendapatan perusahaan terhadap penggunaan aset

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan :

1. Nilai Perolehan Aset (*Assets Cost*)
 Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset tetap digunakan. Jadi,

disamping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan.

2. Nilai Residu (*Salvage Value*)

Merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai residu ini mencerminkan nilai estimasi dimana aset dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya (pada saat estimasi masa manfaat aset berakhir).

3. Umur Ekonomis (*Economic Life*)

Umur ekonomis aset dapat dinyatakan baik berdasarkan faktor estimasi waktu ataupun faktor estimasi penggunaan. Faktor waktu dapat berupa periode bulanan atau tahunan, sedangkan faktor pemakaian sering berupa jam operasional atau jumlah unit produksi (*output*) yang dihasilkan dari aset tetap.

2.4 Pajak Penghasilan

2.4.1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen dan mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dalam pengaturan perpajakan:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1991
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1994
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2000
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Menurut Resmi (2017) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Teori dan Kasus* menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 46 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas”.

Dalam undang-undang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajaknya adalah penghasilan. terdapat banyak sekali definisi penghasilan, namun definisi yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah definisi yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah definisi

penghasilan menurut UU PPh. Berdasarkan pasal 4 UU PPh, penghasilan didefinisikan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan dalam hal ini Pajak Penghasilan badan dibayarkan setahun sekali dan dikenakan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar para Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh pemerintah tidak diselewengkan oleh para Wajib Pajak.

2.4.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak dikenakan akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPh No 11 tahun 2020, Subjek Pajak dikelompokan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - a. Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri apabila
 - 1) Dalam Negeri
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
 - b) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya ke Indonesia.
 - c) Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia serta mempunyai niat tinggal di Indonesia.
 - 2) Luar Negeri:
 - a) Orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia
 - b) Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
 - c) Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
 - (1) Tempat tinggal

- (2) Pusat kegiatan utama
 - (3) Tempat menjalankan kebiasaan
 - (4) Status subjek pajak dan/atau
 - (5) Persyaratan tertentu lainnya
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pajak pengganti, yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris).
2. Badan
- a. Dalam negeri:
Apabila sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara maupun daerah dengan nama atau bentuk apapun.
- b. Luar negeri:
Badan yang bertempat kedudukan di luar indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Merupakan subjek pajak yang diperlakukan perpajakannya di persamakan dengan subjek pajak badan. Tidak termasuk subjek pajak adalah:
- a. Kantor perwakilan negara asing
 - b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing
 - c. Organisasi-organisasi
 - d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun Resmi (2017).

Penghasilan itu sendiri yang sejenis jenisnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Adapun kriteria yang bukan objek penghasilan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 pasal 4 ayat 3 sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui indonesia

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

Kemudian penghasilan yang termasuk Objek Pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No 11 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.5 Pajak Penghasilan Penyusutan Aset Tetap

2.5.1. Golongan Aset Tetap

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Aset tetap berwujud bergerak, yaitu aset tetap berwujud yang dapat dengan mudah berpindah atau dipindahkan. Misalnya kendaraan, perlengkapan dan sebagainya.
2. Aset tetap berwujud tidak bergerak, misalnya tanah, gedung, dan sebagainya

Harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok yaitu:

1. Kelompok 1: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, misalnya peralatan, mebel, kendaraan, dan truk ringan
2. Kelompok 2: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, misalnya mebel dan peralatan yang terbuat dari logam, truk berat, mobil tangki dll
3. Kelompok 3: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, misalnya mesin-mesin yang menghasilkan peralatan, mesin produksi, dll
4. Kelompok 4: kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun

Harta berwujud yang bangunannya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Permanen, masa manfaatnya 20 tahun
2. Tidak permanen, bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Kemudian metode lain yang digunakan adalah metode saldo menurun (*declining balance methode*) penyusutan atas pengeluaran harta berwujud

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain bangunan, dapat juga dilakukan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Wajib Pajak dibolehkan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperbolehkan untuk semua kelompok harta tetap berwujud sedangkan metode saldo menurun hanya diperbolehkan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Berikut tabel yang menggambarkan kelompok Harta Berwujud, Metode, dan Tarif Penyusutan:

Tabel 2.1 Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan:			
kelompok 1	4 tahun	25%	50%
kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan:			
permanen	20 tahun	5%	
tidak permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-Undang No.11 Tahun 2020

Saat penyusutan dapat dimulai pada:

1. Bulan dilakukan pengeluaran
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai
3. Dengan izin Direktorat Jendral Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
5. Tentang, jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Dibawah ini merupakan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal: A. kelompok 1
6. Kelompok 1 25%
7. Tarif penyusutan 25%
8. Masa manfaat 4 tahun
9. Kelompok 2 tarif penyusutan 12,5%
10. Tarif penyusutan 12,5% masa manfaat 12 tahun
11. Masa manfaat 8 tahun
12. Kelompok 3 tarif penyusutan 6,25%

13. Tarif penyusutan 6,25%
14. Masa manfaat 16 tahun
15. Kelompok 4
16. Tarif penyusutan 5%
17. Masa manfaat 20 tahun

2.6 Pajak Penghasilan Badan

Dalam dunia perpajakan ada yang disebut dengan pajak badan. Pengertian pajak badan sendiri merujuk pada pajak penghasilan (PPH) badan, yakni pajak atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh sebuah badan usaha selama satu tahun pajak. Sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Dengan demikian, pengertian Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan.

Menurut Pohan (2015) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Badan merupakan salah satu yang menjadi subjek pajak. Pajak badan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimasuk adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sehingga perhitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan perhitungan penghasilan bersih.

Dalam menghitung pajak penghasilan terutang, dibedakan antara Wajib Pajak badan dalam negeri dan Wajib Pajak badan luar negeri. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT) sebesar 28% Tarif PPh tersebut menjadi 25%. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.6.1 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau pekerjaan atau penghargaan.
3. Laba
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

2.6.2 Subjek Pajak

Subjek dan objek PPh badan juga telah diatur. Adapun yang termasuk dalam subjek PPh badan ada dua, yakni Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Adapun yang termasuk badan menurut UU Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

1. Firma
2. Kongsi
3. Koperasi
4. Perseroan Terbatas (PT)
5. Perseroan Lainnya
6. Dan Pensiun
7. Perkumpulan
8. Persekutuan
9. Yayasan
10. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
11. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
12. Organisasi Masyarakat
13. Organisasi Sosial Politik
14. Organisasi lainnya

2.6.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tarif PPh badan mengalami pergantian beberapa kali. Berita baiknya, pergantian ini merupakan penurunan. Pada 2009, besarnya tarif PPh badan adalah 28% dan turun menjadi 25% pada 2010. Setelah itu, terjadi lagi penurunan menjadi 22% pada 2020 dan 2021. Terbaru, kini besaran tarif PPh badan sejak 2022 adalah 20%. Wajib Pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (Tbk) pun memperoleh tarif PPh 3% lebih rendah dibandingkan PPh badan umum. Sejak 2023, besarnya PPh PT adalah 17% dengan ketentuan:

1. Saham dikuasai oleh minimal 300 pihak.
2. Tiap pihak dalam PT menguasai saham di bawah 5%.
3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek harus dipenuhi dalam setidaknya 183 hari kalender dalam 1 tahun pajak.
4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

2.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16

PSAK 16 tahun 2007 merupakan langkah baru dalam acuan pengakuan aset tetap di dalam akuntansi Indonesia. Sebelumnya, pengakuan nilai buku aset tetap disajikan dari nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan, namun dengan Revisi PSAK 16 tahun 2007 ini membuka alternatif lain penilaian aset tetap dengan cara revaluasi, yaitu dihitung dengan nilai wajar.

2.7.1 Cara Perolehan Aset Tetap

Menurut Hartanto (2002) untuk memperoleh suatu aset tetap dapat menempuh beberapa cara, antara lain:

1. Perolehan dengan Pembelian Tunai (*Acquisition by purchase for cash*)
Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan sewa biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan pembelian atau persiapan penggunaannya. Perolehan beberapa aset dibeli secara bersamaan dengan suatu jumlah total pembayaran, tanpa dibuat penilaian masing-masing, maka perlu ditentukan besar nilai masing-masing aset yang didasarkan pada harga pasar.
2. Perolehan dengan Pembelian Angsuran (*Acquisition by purchase on longterm contract*)
Apabila aset tetap dengan pembelian secara angsuran maka nilai aset dicatat sebesar harga pembeliannya tidak termasuk unsur bunga yang dicatat sebagai beban bunga selama masa angsuran.
3. Perolehan dengan Pertukaran (*Acquisition by exchange*)
4. Perolehan dengan Surat Berharga (*Acquisition by Issued for Securities*)
Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan surat-surat berharga misalnya: saham atau obligasi, maka dasar dari penilaian aset tetap dicatat sebesar harga saham atau obligasi dan digunakan sebagai dasar pertukaran. Apabila harga saham atau obligasi tidak diketahui, harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga aset tersebut. Namun kadang-kadang aset tetap tertentu tidak diketahui harga pasarannya maka pencatatan aset tersebut didasarkan atas harga taksiran yang ditentukan oleh manajemen perusahaan atau perusahaan penilai.
5. Perolehan dengan Membangun sendiri
Perusahaan dalam memperoleh aset tetap dengan cara membangun sendiri, mempunyai beberapa alasan yaitu untuk mendapatkan kualitas dan atau konsistensi yang lebih baik, untuk memanfaatkan fasilitas yang menganggur, dan menghemat biaya
6. Perolehan aset dari hadiah/donasi/sumbangan (*Acquisition by Donation*)
7. Perolehan dengan cara Sewa Guna Usaha (*Acquisition by Leasing*)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tentang Aset Tetap. PSAK 16 paragraf 06 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengakuan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan
- b. biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran saat pengakuan aset tetap memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan yang meliputi (a) harga perolehannya (b) biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Pengukuran setelah pengakuan entitas dapat memilih antar model biaya adalah model yang selama ini kita kenal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, atau dengan metode revaluasi setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

2.8 Sewa Guna Usaha Perpajakan Menurut PSAK 73

PSAK 73 tentang sewa resmi diterapkan secara efektif per tanggal 1 Januari 2020. PSAK ini menggantikan:

1. PSAK 30: Sewa
2. ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
3. ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif
4. ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
5. ISAK 25: Hak atas Tanah

Perubahan menjadi PSAK 73 ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Ketentuan sebelumnya tentang sewa mensyaratkan penyewa dan pesewa untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Model tersebut dikritisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan karena tidak selalu memberikan representasi yang tepat atas transaksi penyewaan. Khususnya, pada

ketentuan tersebut tidak mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari sewa operasi.

PSAK 73: Sewa memperkenalkan model akuntansi tunggal penyewa dan mensyaratkan agar penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa. Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali untuk:

1. Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui;
2. Sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur yang dimiliki oleh penyewa;
3. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa;
4. Lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup
5. DE PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan
6. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup
7. PSAK 19: Aset Takberwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta.

Selain itu, penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan tersebut untuk:

1. Sewa jangka pendek; dan
2. Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Sebagai konsekuensinya, penyewa mengakui penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2.

2.9 Koreksi Fiskal

Penyesuaian keuangan dilakukan karena perbedaan pendapatan dan perbedaan pendapatan Biaya antara laporan keuangan bisnis dan laporan keuangan pajak mungkin ada perbedaan dalam perhitungan pendapatan kena pajak. Penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat sesuai standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau dikoreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak

memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening riil pada neraca atau laporan laba rugi.

Koreksi fiskal proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Estralita, 2013), selanjutnya beberapa penyebab koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

1. **Beda Permanen/ Tetap**
Beda tetap disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya.
2. **Beda sementara waktu**
Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama tetapi beda alokasinya setiap tahun.

2.9.1 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Adapun jenis koreksi fiskal dalam bukunya akuntansi perpajakan, Agoes dan Estralita (2013) berpendapat bahwa:

1. **Koreksi Fiskal Positif**
Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut
 - a. Beban yang tidak diakui oleh pajak;
 - b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
 - c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
 - d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
2. **Koreksi Fiskal Negatif**
Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif dilakukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
 - b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
 - c. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal;
 - d. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal;
 - e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;
 - f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.10 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.10.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis antara lain:

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Puji Rahayu dan Hariana Septian, (2020) Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras Gresik)	Variabel independen: • Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Variabel dependen: • Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode garis lurus • Metode saldo menurun • Pajak Penghasilan Badan 	Metode dalam penelitian ini adalah evaluasi dan jenis penelitian kualitatif	Perusahaan PT Petrokopindo Cipta Selaras sudah benar dalam melakukan Pengakuan aset tak berwujud, pembukuannya, metode dan tarif yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Terlihat biaya amortisasi pada tahun 2019 lebih besar sehingga dalam perhitungan pajak penghasilan lebih hemat menggunakan metode saldo menurun. Dalam perpajakan ini terkait beda waktu pembebanan. Metode saldo menurun sangat sesuai jika digunakan dalam kondisi perekonomian sedang merosot seperti saat ini dampak dari covid-19.
2	Ulfa Husain (2017) Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aktiva Tetap Dan Perhitungan Pajak Badan Pdam Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa	Independen: • Penyusutan aktiva tetap Dependen: • Perhitungan pajak badan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode saldo menurun • Pajak penghasilan badan 	Metode Analisis dalam penelitian adalah menggunakan metode penelitian Analisis Deskriptif	Perusahaan yang diteliti menerapkan perencanaan pajak melalui penyusutan aktiva tetap dengan cara menghitung penyusutan aktiva tetap dan dampaknya bagi pajak sebelum dilakukan penyusutan dan setelah dilakukan penyusutan aktiva tetap. Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk

No	Nama peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					menghitung penyusutan aktiva tetap.
3	Juhli Edi Simanjuntak, Shelly, Dan Salihi (2022) Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Ace Hardware Indonesia TBK	Independen: Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Variabel Dependen: Efisiensi Pembayaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Metode garis lurus • Metode saldo menurun • Pajak penghasilan badan 	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan aset tetap dapat membantu dalam efisiensi pembayaran pajak dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi sehingga pajak yang dihasilkan akan lebih rendah begitu sebaliknya dengan metode garis lurus, maka metode saldo menurun lebih tepat dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan. Perusahaan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk telah menerapkan metode penyusutan garis lurus, sehingga perusahaan perlu melakukan perubahan metode penyusutan agar perencanaan pajak dalam tercapai secara efektif.
4	Dwi Urip Wardoyo, Kadek Saptaria Wagisuwari dan Ni Made Dinda Savitri Utami (2022) Analisis Perhitungan Aset Tetap Terhadap Laba Perusahaan Pada PT Mayora Indah Tbk	Independen: Perhitungan Aset Tetap Dependen: Laba Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode garis lurus • Metode saldo menurun ganda • Metode jumlah angka tahun • Laporan keuangan 	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menemukan bahwa metode garis lurus adalah cara yang efektif untuk menghitung beban penyusutan karena dapat memberikan beban yang stabil dan tidak akan mempengaruhi laba bersih setiap tahun secara agresif.
5	Munazar Husein (2019) Analisis Metode Penyusutan Aktiva Tetap Dan Hubungannya Dengan PPH Badan (Studi Kasus Pada PT Pertamina Ep Pangkalan Susu)	Independen: Metode penyusutan aktiva tetap Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak penghasilan badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penyusutan garis lurus • Metode penyusutan saldo menurun • Pajak penghasilan badan 	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode penyusutan aktiva tetap PT. Pertamina EP Pangkalan Susu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun metode yang digunakan tidaklah efektif dalam meminimalkan nilai Pajak Penghasilan (PPH). Pihak PT. Pertamina EP Pangkalan Susu sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan yang lama dan menggunakan metode penyusutan yang disarankan

No	Nama peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					oleh penulis, karena penerapan metode penyusutan aktiva tetap sangat mempengaruhi nilai Pajak Penghasilan (PPH)
6	Vinji Anggun Setyawati, Fauziah, dan Miladiah Kusumaningrat (2022) Analisis Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Pada Koperasi Langgeng Mulyo	Independen: Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun Dependen: Menentukan Pajak Penghasilan Terutang	<ul style="list-style-type: none"> • Metode saldo menurun • Pajak Penghasilan Badan 	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian bahwa perhitungan penyusutan menggunakan metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dibanding dengan metode penyusutan yang digunakan oleh Koperasi Langgeng Mulyo sebelumnya yaitu dengan perhitungan penyusutan metode garis lurus tahun 2020 sebesar Rp79.300580 dan tahun 2022 sebesar Rp104.470.211, sedangkan untuk perhitungan saldo menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 115.271.008 dan tahun 2022 sebesar Rp 192.164.572. Diperoleh perbedaan untuk tahun 2020 sebesar Rp 35.970.428 dan tahun 2022 sebesar Rp 87.649.361.
7	Ajeng C Mardjani, (2015) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Pt. Utama Karya Karya Manado	Independen: Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut SAK Dan Peraturan Perpajakan Dependen: Laporan Keuangan Pada Pt. Utama Karya Karya Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Metode garis lurus • Metode saldo menurun • Pajak Penghasilan badan • Laporan keuangan 	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah beban penyusutan aset yang dihitung perusahaan menggunakan metode garis lurus telah diakui dengan baik, namun belum konsisten.
8	Kanilla Br Ginting (2019) Analisis penyusutan aset tetap PSAK 16 Dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada PT Sahabat Mulia Jaya	Penyusutan Aset Tetap	Metode penyusutan aset tetap	Analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap kendaraan kendaraan, mesin dan peralatan dalam akuntansi dan fiskal.
9	Akhmad Ryan Dhiya 'Ulhaq (2021) Studi Literatur Mengenai Dampak	Penerapan Psak 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi sewa dan penyusutannya dan koreksi fiskal pada 	Analisis deskriptif kualitatif	Penerapan PSAK 73 sebagai standar akuntansi keuangan baru yang berlaku efektif 1 Januari 2022 menyebabkan penyewa

No	Nama peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Penerapan Psak 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa	Perpajakan Badan	Pajak Penghasilan Badan		mengklasifikasikan hampir seluruh transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan. Pengecualian transaksi sewa sebagai sewa operasi dapat diterapkan untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.
10	Anisa Putri Mayangsari dan Yayuk Nurjanah (2018) Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Harga perolehannya 	Analisis Deskriptif	Hal ini menjelaskan bahwa pengungkapan pada Bangun Perkasa Furniture tidak sesuai dengan PSAK 16. Bangun Perkasa Furniture menerapkan sistem pengukuran penyusutan dan penghentian aset yang sesuai dengan PSAK 16, dikarenakan Bangun Perkasa Furniture tidak memiliki CALK dalam penyajian laporan keuangannya membuat ketidaksesuaian dengan penerapan yang ada pada PSAK No.16 walaupun sebenarnya dalam Laporan Posisi Keuangan Bangun Perkasa Furniture telah sesuai dengan PSAK 16

Berdasarkan dari tabel penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas maka berikut dijelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Puji Rahayu dan Hariana Septian (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Variabel dependen: Pajak Penghasilan Badan 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen adalah Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras Gresik sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk. Metode analisis yang digunakan adalah evaluasi, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
2	Ulfa Husain (2017)	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen: Penyusutan Aktiva Tetap Variabel dependen: Pajak Penghasilan Badan 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel independen adalah Penyusutan aktiva Tetap sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Pada Pdam Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk.
3	Juhli Edi Simanjuntak, Shelly, Dan Salihi (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap • Variabel dependen: Efisiensi Pembayaran Pajak • Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aset Tetap sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap • Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Pada PT. Ace Hardware Indonesia Tbk sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk
4	Dwi Urip Wardoyo, Kadek Saptaria Wagisuwari dan Ni Made Dinda Savitri Utami (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Perhitungan Aset Tetap • Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Perhitungan Aset Tetap sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap • Variabel dependen adalah Laba Perusahaan sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penghemat Pajak Penghasilan • Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Pada PT Mayora Indah Tbk sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk
5	Munazar Husein (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Metode penyusutan aktiva tetap • Variabel dependen: Pajak Penghasilan Badan • Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Metode penyusutan aktiva tetap sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap • Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Pada PT Pertamina Ep Pangkalan Susu sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk
6	Vinji Angun Setyawati, Fauziah, dan Miladiah Kusumaningrat (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun. • Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Saldo Menurun sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap • Variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Terutang sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penghemat Pajak Penghasilan • Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Koperasi Langgeng Mulyo sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk
7	Ajeng C Mardjani (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut SAK Dan Peraturan Perpajakan • Variabel dependen: Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen adalah Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut SAK Dan Peraturan Perpajakan sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap • Lokasi penelitian yang digunakan adalah

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 	<p>pada PT. Utama Karya Manado sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada PT. Mustika Ratu Tbk</p>
8	Kanilla Br Ginting (2019) Analisis penyusutan aset tetap PSAK 16 Dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada PT Sahabat Mulia Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Penyusutan Aset Tetap • Variabel Dependen Koreksi Fiskal pada Pajak Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang diteliti adalah PT Sahabat Mulia Jaya
9	Akhmad Ryan Dhiya ‘Ulhaq (2021) Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa Pada PT YYN	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Aset Tetap dan penyusutan • Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan • Penerapan PSAK 73 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang diteliti adalah PT RYN • Periode penelitian hanya satu tahun yaitu pada tahun 2020
10	Anisa Putri Mayangsari dan Yayuk Nurjanah (2018) Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Tunggal Aset Tetap dan penyusutan • Penerapan PSAK 16 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian pada CV Bangun Perkasa Furniture • Waktu penelitian tahun 2018 • Laporan keuangan yang diteliti satu tahun

Berdasarkan tabel penelitian sebelumnya dan persamaan dan perbedaan penelitian yang sudah disajikan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang secara umum membahas mengenai aset tetap, aset tetap sewaan dan penyusutannya seperti penelitian yang dilakukan oleh Kanilla Br Ginting (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Dhiya ‘Ulhaq (2021) dan Anisa Putri Mayangsari dan Yayuk Nurjanah (2018). Dan penelitian sebelumnya yang membahas secara umum mengenai koreksi fiskal dan perpajakan badan yang dilakukan oleh Dhiya ‘Ulhaq (2021).

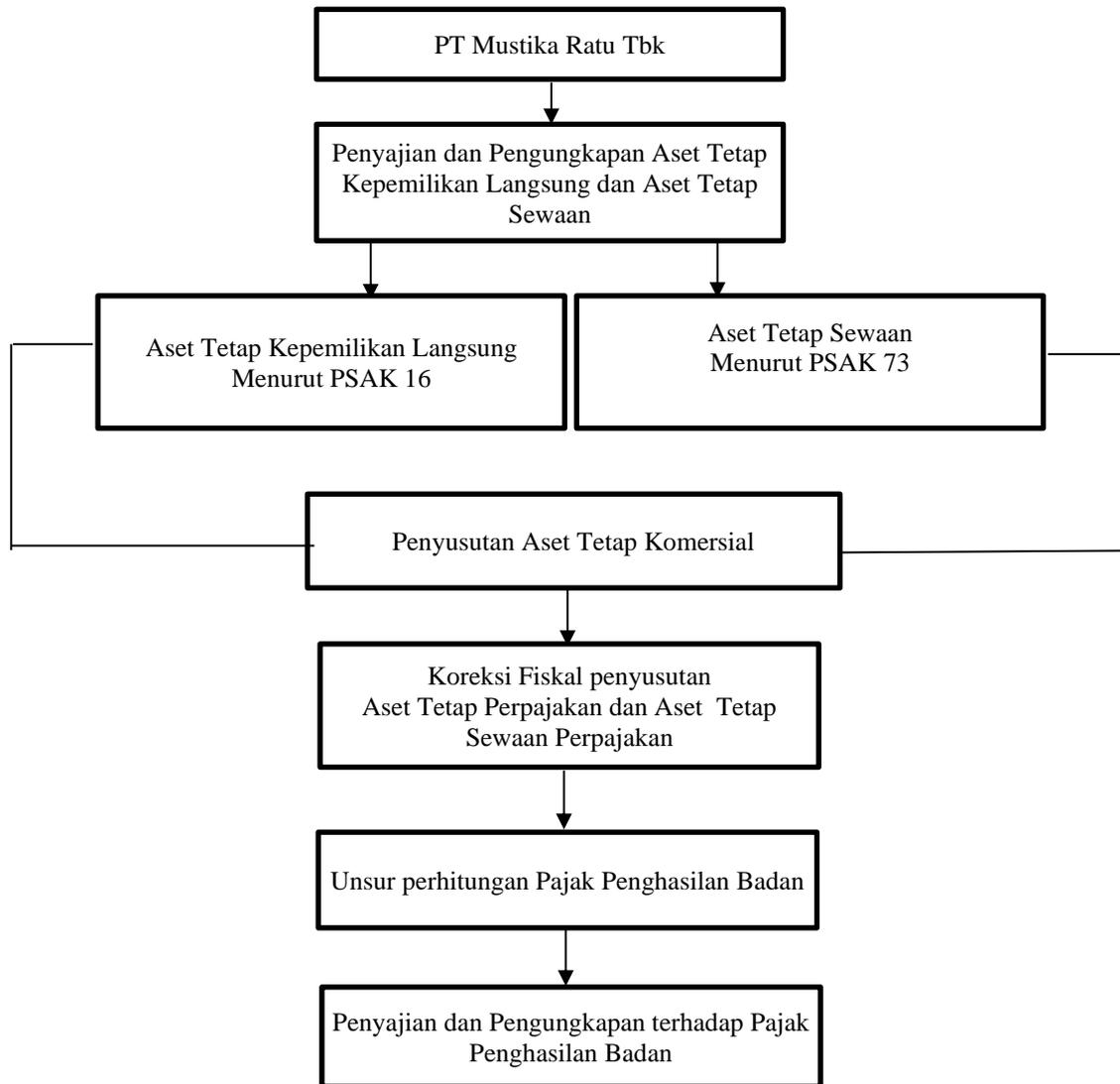
2.10.2 Kerangka Pemikiran

Aset tetap adalah aset tidak lancar yang berwujud, dimiliki, dan digunakan oleh perusahaan dalam operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu,

aset tetap memiliki masa pemanfaatan yang lebih besar daripada aset lancar dan biasanya tidak untuk dikonsumsi atau diubah menjadi kas dalam waktu satu tahun.

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Manajemen melalui perencanaan pajak berupaya untuk meminimumkan kewajiban pajak secara legal dan mengefisienkan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meminimalkan biaya pajak secara legal.

Tax Saving merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka diagram berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pengungkapan dan penyajian aset tetap kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan beserta penyusutannya terhadap Penyajian Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) pada PT Mustika Ratu Tbk periode 2019-2022 ditinjau dari PSAK No.16 dan PSAK 73.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah penyajian dan pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan dan penyusutannya.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, dengan kata lain yaitu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah *organization* yaitu PT Mustika Ratu Tbk.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis atau tempat dimana unit analisis penelitian tersebut berada. Lokasi penelitian yaitu PT Mustika Ratu Tbk, perusahaan yang diteliti sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan laporan keuangan perusahaan dapat diakses dan diperoleh melalui situs resmi www.idx.co.id dan situs www.mustika-ratu.co.id.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu jenis data yang menyatakan jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Dimana aset tetap, aset tetap sewaan, penyusutan dan Pajak Penghasilan Badan dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang termasuk ke dalam data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang lebih tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk periode 2019-2022.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Analisis Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Kepemilikan Langsung Dan Aset Tetap Sewaan Beserta Penyusutannya Terhadap Penyajian Pajak Penghasilan Badan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Perusahaan	Aset Tetap dan penyusutan (Kepemilikan Langsung)	Penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 16	Nominal
	Aset tetap sewaan dan penyusutan	Penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 73	Nominal
Pajak Penghasilan Badan	- Koreksi fiskal - Pajak terutang	Penyajian dan Pengungkapan PPH badan	Nominal

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penulisan skripsi ini adalah Riset Kepustakaan (*Library research*). Pada riset kepustakaan ini data yang dikumpulkan melalui membaca dan mempelajari teori-teori serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan. Selain itu dilakukan melalui penelusuran dengan cara mengakses dan mengunduh data yang berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022 yang telah dipublikasikan di situs resmi yaitu situs www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan www.mustika-ratu.co.id.

3.6 Metode Analisis Data/ Pengolahan Data

3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai penyajian dan pengungkapan aset tetap dan penyusutannya yang berpengaruh pada pengungkapan dan penyajian Pajak Penghasilan Badan pada PT Mustika Ratu Tbk Periode 2019-2022 ditinjau dari PSAK No.16 dan PSAK No.73.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisis data penelitian ini mengacu pada model kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Data yang dimaksud meliputi hasil analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk, Adapun analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan *mendownload* laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk periode 2019-2022 melalui *website* resmi PT Mustika Ratu Tbk atau melalui www.idx.co.id.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan agar tujuan dari penelitian dapat tercapai dan memperoleh kesimpulan yang diharapkan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan antara PSAK 16, PSAK 73 dengan kebijakan akuntansi PT Mustika Ratu Tbk.
- b. Perbandingan tersebut mencakup antara lain pengungkapan dan penyajian aset tetap dan aset tetap sewaan beserta penyusutannya terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Meliputi:
 - 1) Pada pengungkapan, menunjukkan semua mengenai aset tetap perusahaan yang dimiliki sudah atau belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - 2) Pada penyajian, aset tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan pada bagian neraca sebelah debit dan masuk dalam kelompok aset
- c. Dari hasil perbandingan akan didapat kesimpulan atas hasil penelitian tersebut.
- d. Jika terdapat perbedaan antara PSAK 16, PSAK 73 dan penyajian dan pengungkapan akuntansi perusahaan mengenai aset tetap dan aset tetap sewaan dan penyusutan maka akan terdapat koreksi fiskal pada PPh Pajak Penghasilan Badan yang diungkapkan dan disajikan oleh PT Mustika Ratu Tbk.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Setelah analisis data selesai dilakukan, selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diolah, dalam penelitian ini penyajian data mencakup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan dengan berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 73 yang disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi.

4. Hasil dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang di dapat adalah sesuai atau tidaknya perlakuan aset tetap dan aset tetap sewaan dan aset penyusutannya berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 73 pada PT Mustika Ratu Tbk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT Mustika Ratu Tbk

Mustika Ratu lahir dari keinginan untuk berbagi warisan budaya Indonesia lewat rangkaian produk dan perawatan alami kaya manfaat bermutu tinggi. Memanfaatkan kekayaan alam dan budaya Indonesia, Mustika Ratu melestarikan pusaka bangsa melalui rangkaian produk dengan sentuhan kemewahan yang akan memancarkan kecantikan dan kebugaranmu. Berawal dari usaha kecil (UMKM) pengolahan jamu dan kosmetik yang dilakukan Ibu Mooryati Soedibyo pada tahun 1975 mendapat banyak tanggapan positif dari kerabat dan teman-temannya. PT Mustika Ratu mulai beroperasi pada 14 Maret 1978 dan mendapatkan reputasi yang baik sebagai pengembang produk kecantikan dan jamu kesehatan tradisional Mustika Ratu go public dengan melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berbagai sertifikat penanda kualitas diperoleh Mustika Ratu pada tahun ini, yaitu ISO 14001 dan ISO 9002. Mustika Ratu mulai memperluas distribusi produk dan franchise spa sampai ke negara-negara Asia Tenggara & Middle East. Missi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi dan mempertahankan kekayaan sumber daya alam dan budaya Indonesia, dan mengangkatnya dengan pengetahuan dan teknologi modern.
2. Memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi
3. Menginspirasi karyawan kami dalam memberikan kepuasan konsumen.



Sumber: Mustika Ratu.co.id

Gambar 4.1 Logo Perusahaan

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap dan Penyusutannya Pada PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022

Perusahaan dalam melakukan kegiatannya tentu memiliki sumber daya fisik yang bersifat permanen dan tahan lama dan dengan sumber daya ini maka kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Aset tetap adalah

aset yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Aset tetap harus disajikan secara teliti dan dapat dipastikan kebenarannya. Karena jika terdapat kesalahan maka akan berdampak pada perusahaan dan pada pengambilan keputusan perusahaan di masa mendatang. Berikut adalah kebijakan Akuntansi Aset Tetap disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
Klasifikasi	<p>Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai 2. Peralatan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 4. Jalan, irigasi dan bangunan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 5. Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 6. Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sumber : Kebijakan Akuntansi, 2023

Penyajian aset tetap terlihat dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Setiap jenis aset tetap seperti tanah, bangunan, investaris kantor, dan lain sebagainya dinyatakan dalam posisi laporan keuangan secara terpisah atau terinci dalam catatan atas laporan keuangan

Hasil analisis pada penelitian yang diperoleh dari perusahaan akan dibandingkan dengan ketentuan PSAK No.16 (2015) tentang aset tetap. Pembahasan perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 (2015) dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan pada PT Mustika Ratu Tbk tahun 2019-2022, sehingga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Perbandingan Penyajian Aset Tetap oleh Perusahaan dengan PSAK No.16

PSAK 16	PT Mustika Ratu Tbk
1. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.	1. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.
2. Setiap jenis aset seperti tanah, bangunan, inventaris kantor dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	2. Setiap jenis aset seperti tanah, bangunan, inventaris kantor dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode jumlah unit.	3. Untuk menentukan besaran beban penyusutan, perusahaan menerapkan metode garis lurus.
4. Jumlah perhitungan penyusutan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai tercatat dan umur manfaat.	4. Jumlah perhitungan penyusutan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai tercatat dan umur manfaat.
5. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan	5. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan
6. Laporan keuangan yang disajikan harus akurat dan dapat di gunakan untuk pengambilan Keputusan	6. Laporan keuangan yang disajikan harus akurat dan dapat di gunakan untuk pengambilan Keputusan

Sumber: Data primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 dan penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di PT Mustika Ratu Tbk. Sesuai dengan hasil penelitian yang ada, perlakuan akuntansi untuk penyajian aset tetap yang disajikan oleh PT Mustika Ratu Tbk semuanya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 16. Hasil penelitian yang lebih memperkuat antara penyajian aset tetap perusahaan dengan PSAK 16 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Penyajian Aset pada Laporan Posisi Keuangan PT Mustika Ratu Per 31 Desember Tahun 2019-2020

	2019 (Rp)	2020 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	10.099.505.476	11.695.694.524
Piutang usaha-pihak ketiga	214.230.984.938	215.136.542.425
Piutang lain-lain- pihak ketiga	20.534.938.159	20.631.042.568
Persediaan	128.353.150.403	146.622.901.883
Pajak dibayar dimuka	3.956.195.699	568.059.217
Biaya dibayar dimuka	28.570.889.295	18.756.787.846
Uang muka pemasok dll	6.962.054.091	19.165.426.823
Jumlah Aset Lancar	412.707.718.061	432.576.455.286
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap-bersih	54.872.479.523	55.965.014.371
Properti investasi	25.707.340.772	25.356.431.941
Uang jaminan-pihak berelasi	2.020.250.761	2.001.573.293
Tagihan pajak penghasilan	9.985.120.794	3.010.440.267
Aset pajak tangguhan	9.545.501.796	11.416.364.209
Aset tidak lancar lainnya	17.924.536.288	29.469.658.084
Jumlah Aset tidak lancar	120.055.229.934	127.219.482.165
Jumlah Aset	532.762.947.995	559.795.937.451

Sumber: Laporan Tahunan PT Mustika Ratu Tbk, 2019-2021

Pada laporan keuangan pokok yaitu laporan posisi keuangan pos-pos yang berkaitan dengan aset tetap terhadap total aset untuk tahun 2020 dan 2019 diperlihatkan pada table berikut:

Tabel 4.4 Penyajian Aset Tetap dan Aset Tetap Sewaan PT Mustika Ratu per 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Aset	2019	2020
Total Aset Kepemilikan Langsung	177.053.605.443	181.885.301.875
Total Aset tetap sewaan	1.480.000.000	1.480.000.000
Total Aset Tetap	178.533.605.443	183.845.301.875
Total Aset	532.762.947.995	559.795.937.451
Presentase	34%	33%

Sumber: Laporan Tahunan PT Mustika Ratu Tbk, 2019-2021

Berdasarkan tabel 4.4 yang menyajikan aset tetap dan aset tetap sewaan pada PT Mustika Ratu Tbk, yang menunjukkan bahwa nilai aset kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan sebesar 34% dari total aset yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai aset kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan sebesar 33%, Persentase nilai aset kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan pada tahun 2019 dan tahun 2020 lebih besar 25% dari total aset yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu Tbk, artinya bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset tetap yang banyak. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka beban depresiasi yang ditanggung atas kepemilikan aset tetap tersebut akan semakin besar.

Tabel 4.5 Penyajian Aset pada Laporan Posisi Keuangan PT Mustika Ratu Per 31 Desember Tahun 2021-2022

	2021 (Rp)	2022 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan kas di bank	8.693.405.081	177.143.354.144
Piutang usaha-pihak ketiga	212.825.582.283	166.316.482.373
Piutang lain-lain- pihak ketiga	12.994.705.880	10.579.327.128
Persediaan	190.870.625.464	206.648.966.313
Pajak dibayar dimuka	586.243.890	625.140.057
Biaya dibayar dimuka	17.926.775.887	13.366.334.004
Uang muka pemasok dll	15.441.291.055	12.172.535.088
Jumlah Aset Lancar	459.338.629.540	586.852.139.107
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap-bersih	52.843.940.911	49.266.249.003
Properti investasi	27.256.431.941	-
Uang jaminan-pihak berelasi	2.001.573.293	2.001.573.293
Aset pajak tangguhan	9.553.180.633	32.761.900.716
Aset tidak lancar lainnya	27.267.219.270	23.898.735.680
Jumlah Aset tidak lancar	118.922.346.048	107.928.458.692
Jumlah Aset	578.260.975.588	694.780.597.799

Sumber: Laporan Tahunan PT Mustika Ratu Tbk, 2021-2022

Pada laporan keuangan pokok yaitu Laporan Posisi Keuangan pos-pos yang berkaitan dengan Aset Tetap terhadap Total Aset untuk tahun 2021 dan 2022 diperlihatkan pada table berikut:

Tabel 4.6 Penyajian Aset Tetap dan Aset Tetap Sewaan PT Mustika Ratu per 31 Desember 2021 dan 2022

Jenis Aset	2021	2022
Total Aset Kepemilikan Langsung	179.336.800.297	180.536.657.666
Total Aset tetap sewaan	1.020.912.540	1.020.912.540
Total Aset Tetap	180.357.712.837	181.557.570.206
Total Aset	578.260.975.588	694.780.597.799
Presentase	31%	26%

Sumber: Laporan Tahunan PT Mustika Ratu Tbk, 2021-2024

Berdasarkan tabel 4.4 yang menyajikan aset tetap dan aset tetap sewaan pada PT Mustika Ratu Tbk, yang menunjukkan bahwa nilai aset kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan sebesar 31% dari total aset yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai aset kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan sebesar 26%, Persentase nilai aset kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan pada tahun 2021 dan tahun 2022 lebih besar 25% dari total aset yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu Tbk, artinya bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset tetap yang banyak. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka beban depresiasi yang ditanggung atas kepemilikan aset tetap tersebut akan semakin besar.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk sudah sesuai dengan PSAK 16, dari istilah-istilah yang digunakan sudah sesuai dengan PSAK 16 seperti menggunakan kata aset bukan aktiva, tidak menggunakan kata kewajiban melainkan liabilitas, dan tidak menggunakan kata modal melainkan ekuitas, aturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK berkonvergensi ke IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Berikut adalah rincian aset tetap PT Mustika Ratu yang diungkapkan pada cacatatan laporan keuangan PT Mustika Ratu TBK Periode 2019-2022

Tabel 4.7 Rincian Biaya Perolehan Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk
Tahun 2019

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	11.090.469.852	--	--	--	11.090.469.852
Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.603.708.930	--	--	(486.228.632)	17.117.480.298
Bangunan dan Prasarana	45.232.746.430	707.136.700	--	(213.045.441)	45.726.837.689
Mesin dan Peralatan Pabrik	45.299.710.611	455.125.570	2.379.345.450	(1.606.217.715)	41.769.273.016
Peralatan Kantor	42.533.224.496	669.200.753	611.566.525	(31.947.258)	42.558.911.466
Kendaraan	24.406.833.452	-	5.584.155.004	(32.045.326)	18.790.633.122
Total	186.166.693.771	1.831.463.023	8.575.066.979	(2.369.484.372)	177.053.605.443
Aset tetap sewaan					
Mesin dan peralatan pabrik	--	--	--	1.480.000.000	1.480.000.000
Total	186.166.693.771	1.831.463.023	8.575.066.979	(889.484.372)	178.533.605.443

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2019

Tabel 4. 8 Rincian Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk
Tahun 2019

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	--	--	--	--	--
Sewa Tanah- Jangka Panjang	4.089.059.577	173.820.410	--	(113.897.913)	4.148.982.074
Bangunan dan Prasarana	26.084.114.690	2.005.701.069	--	(90.574.786)	27.999.240.973
Mesin dan Peralatan Pabrik	34.892.218.181	2.222.260.375	2.379.345.450	(335.884.382)	34.399.248.724
Peralatan Kantor	37.293.539.921	1.773.688.774	611.566.525	27.817.196)	38.427.844.974
Kendaraan	24.063.665.533	22.494.322	5.584.155.004	(25.862.343)	18.476.142.508
Total	126.422.597.902	6.197.964.950	8.575.066.979	(594.036.620)	123.451.459.253
Sewa Pembiayaan Langsung					
Mesin dan peralatan pabrik	--	--	--	209.666.667	209.666.667
Total	126.422.597.902	6.197.964.950	8.575.066.979	(384.369.953)	123.661.125.920
Nilai Buku	59.744.095.869				54.872.479.523

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2019

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Grup seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap milik Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp50.210.573.466 dan RM4.850.000. Perusahaan juga memiliki asuransi terhadap

gangguan usaha sebesar Rp30.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggung jawaban tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko kebakaran dan risiko lainnya. Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019.

Tabel 4.9 Rincian Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2020

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	11.090.469.852	--	--	--	11.090.469.852
Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.117.480.298	--	--	479.047.456	17.596.527.754
Bangunan dan Prasarana	45.726.837.689	3.542.799.831	--	209.898.943	49.479.536.463
Mesin dan Peralatan Pabrik	41.769.273.016	917.647.154	--	124.176.820	42.811.096.990
Peralatan Kantor	42.558.911.466	1.439.756.274	100.978.153	31.521.153	43.929.210.740
Kendaraan	18.790.633.122	124.070.850	2.076.532.305	31.572.044	16.869.743.711
Aset dalam penyelesaian	--	108.716.365	--	--	108.716.365
Total	177.053.605.443	6.132.990.474	2.177.510.458	876.216.416	181.885.301.875
Aset tetap sewaan					
Mesin dan peralatan pabrik	1.480.000.000	--	--	--	1.480.000.000
Total	178.533.605.443	6.132.990.474	2.177.510.458	876.216.416	183.365.301.875

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2020

Tabel 4.10 Rincian Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2020

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	--	--	--	--	--
Sewa Tanah- Jangka Panjang	4.148.982.074	176.758.190	--	117.058.067	4.442.798.331
Bangunan dan Prasarana	27.999.240.973	1.486.477.998	--	93.433.986	29.579.152.957
Mesin dan Peralatan Pabrik	34.399.248.724	1.960.985.236	--	124.353.589	36.484.587.54
Peralatan Kantor	38.427.844.974	1.620.634.531	100.978.153	29.457.519	39.976.958.871
Kendaraan	18.476.142.508	132.719.544	2.076.532.305	26.793.386	16.559.123.133
Total	123.451.459.253	5.377.575.499	2.177.510.458	391.096.547	127.042.620.841
Mesin dan peralatan pabrik	209.666.667	147.999.996	--	--	357.666.663
Total	123.661.125.920	5.525.575.495	2.177.510.458	391.096.547	127.400.287.504
Nilai Buku	54.872.479.523	--	--	--	55.965.014.371

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2020

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020.

Tabel 4.11 Rincian Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2021

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	11.090.469.852	--	--	--	11.090.469.852
Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.596.527.754	--	--	(381.380.937)	17.215.146.817
Bangunan dan Prasarana	49.479.536.463	142.821.066	--	(167.105.482)	49.455.252.047
Mesin dan Peralatan Pabrik	42.811.096.990	612.831.973	3.322.920.916	1.410.351.431	41.511.359.478
Peralatan Kantor	43.929.210.740	780.948.061	9.868.800	(25.094.731)	44.675.195.270
Kendaraan	16.869.743.711	74.865.000	1.961.240.632	(25.135.246)	14.958.232.833
Aset dalam penyelesaian	108.716.365	354.691.271	--	(32.263.636)	431.144.000
Total	181.885.301.875	1.966.157.371	5.294.030.348	779.371.399	179.336.800.297
Aset tetap sewaan					
Mesin dan peralatan pabrik	1.480.000.000	--	--	(1.480.000.000)	--
Kendaraan	--	1.020.912.540	--	--	1.020.912.540
Total	183.365.301.875	2.987.069.911	5.294.030.348	(700.628.601)	180.357.712.837

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2021

Tabel 4.12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2021

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	--	--	--	--	--
Sewa Tanah- Jangka Panjang	4.442.798.331	176.112.414	--	(98.552.126)	4.520.358.619
Bangunan dan Prasarana	29.579.152.957	2.028.915.267	--	(79.039.371)	31.529.028.853
Mesin dan Peralatan Pabrik	36.484.587.549	1.899.702.404	3.322.920.916	333.042.108	35.394.411.145
Peralatan Kantor	39.976.958.871	1.361.637.824	9.868.800	(24.053.299)	41.304.674.596
Kendaraan	16.559.123.133	141.726.004	1.961.240.632	(22.786.728)	14.716.821.777
Total	127.042.620.841	5.608.093.913	5.294.030.348	108.610.584	127.465.294.990
Aset tetap sewaan					
Mesin dan peralatan pabrik	357.666.66	73.999.998	--	(431.666.661)	--
Kendaraan	--	48.476.936	--	--	48.476.936
Total	127.400.287.504	5.730.570.847	5.294.030.348	(323.056.077)	127.513.771.926
Nilai Buku	55.965.014.371	--	--	--	52.843.940.911

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2022

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Grup seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal

dari tahun 2036 sampai dengan tahun 2037. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap milik Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp53.609.535.490 dan MYR4.850.000 (2020: Rp50.210.573.466 dan MYR4.850.000). Perusahaan juga memiliki asuransi terhadap gangguan usaha sebesar Rp30.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko kebakaran dan risiko lainnya. Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021

Tabel 4.13 Rincian Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2022

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Tanah	11.090.469.852	--	--	--	11.090.469.852
Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.215.146.817	--	--	706.297.671	17.921.444.488
Bangunan dan Prasarana	49.455.252.047	--	--	309.470.667	49.764.722.714
Mesin dan Peralatan Pabrik	41.511.359.478	186.300.000	618.096.211	194.177.262	41.273.740.529
Peralatan Kantor	44.675.195.270	356.529.445	--	47.329.366	45.079.054.081
Kendaraan	14.958.232.833	10.300.000	--	46.549.169	15.015.082.002
Aset dalam penyelesaian	431.144.000	--	39.000.000	--	392.144.000
Total	179.336.800.297	553.129.445	657.096.211	1.303.824.135	180.536.657.666
Aset tetap sewaan					
Kendaraan	1.020.912.540	--	--	--	1.020.912.540
Total	180.357.712.837	553.129.445	657.096.211	1.303.824.135	181.557.570.206

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2022

Tabel 4.14 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2022

Jenis Jenis Aset	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi & efek translasi Rp	Saldo Akhir Rp
Kepemilikan Langsung					
Sewa Tanah- Jangka Panjang	4.520.358.619	171.774.623	--	194.669.915	4.886.803.157
Bangunan dan Prasarana	31.529.028.853	1.819.419.906	--	156.925.244	33.505.374.003
Mesin dan Peralatan Pabrik	35.394.411.145	1.360.661.794	618.096.211	184.893.562	36.321.870.290
Peralatan Kantor	41.304.674.596	1.140.474.718	--	45.152.654	42.490.301.968
Kendaraan	14.716.821.777	106.021.378	--	45.499.604	14.868.342.759
Total	127.465.294.990	4.598.352.419	618.096.211	627.140.979	132.072.692.177

Aset tetap sewaan					
Kendaraan	48.476.936	170.152.090	--	--	218.629.026
Total	127.513.771.926	4.768.504.509	618.096.211	627.140.979	132.291.321.203
Nilai Buku	52.843.940.911				49.266.249.003

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Mustika Ratu Tbk, 2021

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Grup seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2036 sampai dengan tahun 2037. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap milik Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp53.609.535.490 dan MYR4.850.000 (2021: Rp53.609.535.490 dan MYR4.850.000). Perusahaan juga memiliki asuransi terhadap gangguan usaha sebesar Rp30.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko kebakaran dan risiko lainnya.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022. Aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2022 merupakan proyek pembuatan peralatan kantor dengan persentase penyelesaian sebesar 16%. Pekerjaan diperkirakan selesai pada akhir tahun 2022.

Tabel 4.15 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap Perusahaan dengan PSAK No.16

PSAK 16	PT Mustika Ratu Tbk
1. Mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode jumlah unit.	1. Untuk menentukan besaran beban penyusutan, perusahaan menerapkan metode garis lurus.
2. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan harus diungkapkan.	2. Perusahaan mengungkapkan tentang umur manfaat aset tetap.
3. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto harus diungkapkan.	3. Perusahaan mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
4. Aset tetap yang dimiliki perusahaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, bencana alam, sabotase, perusakan, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang dianggap cukup	4. Aset PT Mustika Ratu Tbk telah diasuransikan terhadap resiko yang mungkin terjadi
5. Setiap jenis aset seperti tanah, bangunan inventaris kantor dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan	5. Setiap jenis aset seperti tanah, bangunan inventaris kantor dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan

Sumber : Data sekunder, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 dan penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di PT Mustika Ratu Tbk. Sesuai dengan hasil penelitian yang ada, perlakuan akuntansi untuk

pengungkapan aset tetap yang diterapkan PT Mustika Ratu Tbk semuanya sesuai dengan ketentuan PSAK No.16.

PT Mustika Ratu Tbk menggunakan metode penyusutan garis lurus yaitu suatu metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun selama masa manfaat suatu aset tetap. Metode ini ditetapkan setelah dilakukannya pengkajian sehingga perusahaan menilai metode garis lurus adalah metode yang paling tepat untuk menyusutkan aset tetap yang dimiliki perusahaan. PT Mustika Ratu memakai metode penyusutan garis lurus dalam mengalokasikan penyusutan aktiva tetapnya. Hasil perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus pada PT Mustika Ratu disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16 Tarif Penyusutan

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Tarif Penyusutan	Umur Ekonomis/ Tahun
1	Sewa Tanah Jangka Panjang	0%	99
2	Bangunan dan Prasarana	2-5%	20-50
3	Mesin dan Peralatan Pabrik	10%	10
4	Peralatan Kantor	20%-50%	20-50
5	Kendaraan	5%	5

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Tabel 4.17 Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung Tahun 2019

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp
1	Tanah	11.090.469.852	--
2	Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.603.708.930	4.089.059.577
3	Bangunan dan Prasarana	45.232.746.430	26.084.114.690
4	Mesin dan Peralatan Pabrik	45.299.710.611	34.892.218.181
5	Peralatan Kantor	42.533.224.496	37.293.539.921
6	Kendaraan	24.406.833.452	24.063.665.533
	Jumlah	186.166.693.771	126.422.597.902

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Tabel 4.18 Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung Tahun 2020

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp
1	Tanah	11.090.469.852	-
2	Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.117.480.298	4.148.982.074
3	Bangunan dan Prasarana	45.726.837.689	27.999.240.973
4	Mesin dan Peralatan Pabrik	41.769.273.016	34.399.248.724
5	Peralatan Kantor	42.558.911.466	38.427.844.974
6	Kendaraan	18.790.633.122	18.476.142.508
	Jumlah	177.053.605.443	123.451.459.253

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

tabel 4.19 Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung 2021

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp
1	Tanah	11.090.469.852	--
2	Sewa Tanah- Jangka Panjang	17.596.527.754	4.442.798.331
3	Bangunan dan Prasarana	49.479.536.463	29.579.152.957
4	Mesin dan Peralatan Pabrik	42.811.096.990	36.484.587.549
5	Peralatan Kantor	43.929.210.740	39.976.958.871
6	Kendaraan	16.869.743.711	16.559.123.133
	Jumlah	181.885.301.875	127.042.620.841

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Tabel 4.20 Pengungkapan Aset Kepemilikan Langsung Tahun 2022

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp
1	Tanah	--	11.090.469.852
2	Sewa Tanah- Jangka Panjang	4.442.798.331	17.215.146.817
3	Bangunan dan Prasarana	29.579.152.957	49.455.252.047
4	Mesin dan Peralatan Pabrik	36.484.587.549	41.511.359.478
5	Peralatan Kantor	39.976.958.871	44.675.195.270
6	Kendaraan	16.559.123.133	14.958.232.833
	Jumlah	127.042.620.841	178.905.656.297

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan pengungkapan aset kepemilikan PT Mustika Ratu pada tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan bahwa jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan meliputi tanah, sewa tanah jangka panjang, bangunan dan prasana, mesin dan peralatan pabrik, peralatan kantor dan kendaraan. Jumlah aset kepemilikan langsung pada tahun 2019 sebesar Rp. 186.166.693.771 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 126.422.597.902. Jumlah harga perolehan aset kepemilikan langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 177.053.605.443 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 123.451.459.253. Jumlah harga perolehan aset kepemilikan langsung pada tahun 2021 sebesar Rp.181.885.301.875 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 127.042.620.841. Jumlah harga perolehan aset kepemilikan langsung pada tahun 2022 sebesar Rp.127.042.620.841 dengan penyusutan sebesar Rp.178.905.656.297

4.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Sewaan dan Penyusutannya Berdasarkan PSAK 73 PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022

PSAK 73 mengenai sewa ini merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang sewa guna usaha dan telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 73 ini juga memberikan perubahan pada model akuntansi sewa untuk penyewa, namun tidak memberikan perubahan pada pemberi sewa. Penyewa dalam PSAK 73 disyaratkan untuk melaporkan seluruh hak dan kewajiban akibat kegiatan sewanya, penyewa dituntut terbuka atas aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa operasi dalam laporan keuangan perusahaan.

PSAK 73 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang sewa. PSAK 73 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dalam laporan keuangan, menggantikan PSAK 30. Ketentuan terkait penyajian dan pengungkapan aset tetap sewaan dan penyusutannya berdasarkan PSAK 73 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset Tetap Sewaan

Aset Hak Guna (*Right-of-Use Asset*): Aset sewaan yang diakui sebagai aset hak guna. Aset ini diukur pada biaya perolehan yang mencakup biaya sewa yang harus dibayar, biaya-biaya langsung awal yang timbul secara langsung, dan estimasi biaya untuk membongkar dan mengembalikan aset ke kondisi semula.

2. Pengukuran

Biaya Perolehan: Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, yang mencakup:

- a) Jumlah yang diakui sebagai liabilitas sewa.
- b) Biaya langsung yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset hak guna.
- c) Estimasi biaya untuk membongkar dan mengembalikan aset ke kondisi semula, jika diperlukan.

3. Penyusutan

- a) Umur Manfaat: Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset tersebut atau selama jangka waktu sewa jika tidak ada jaminan bahwa aset akan dimiliki pada akhir jangka waktu sewa.
- b) Metode Penyusutan: Metode penyusutan yang digunakan harus konsisten dengan metode yang digunakan untuk aset tetap lainnya dan sesuai dengan estimasi umur manfaat aset.

4. Pengungkapan

- a) Entitas harus mengungkapkan informasi tentang sifat sewa, termasuk, deskripsi dan jumlah dari aset hak guna yang dimiliki. Jangka waktu sewa dan jumlah pembayaran sewa minimum yang akan jatuh tempo.
- b) Pengungkapan jumlah tercatat dari aset hak guna pada akhir periode pelaporan, serta penyusutan yang telah diakumulasi.
- c) Informasi tentang biaya sewa yang diakui dalam laporan laba rugi, termasuk biaya amortisasi aset hak guna dan bunga dari liabilitas sewa.
- d) Jika terdapat perubahan dalam estimasi umur manfaat atau jangka waktu sewa, perubahan tersebut harus diungkapkan.

Pada setiap entitas proses akuntansi pasti berakhir pada satu tujuan yaitu menyajikan laporan informasi keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan bergantung pada kebijakan perusahaan yang harus bergantung pada standar yang berlaku. Berikut disajikan laporan laba rugi PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019-2022:

Berikut transaksi sewa yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu Tbk selama periode 2019-2022

1. Pada tanggal 2 Mei 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk pembelian 2 (dua) unit Steam Boiler dengan jangka waktu 36 bulan dan tingkat suku bunga tetap sebesar 6% per tahun
2. Pada tanggal 1 November 2018, entitas anak melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan Public Bank Berhad untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan jangka waktu 108 bulan dan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,28% per tahun. Pada tahun 2020, entitas anak mendapatkan relaksasi pembayaran angsuran sehubungan dengan terjadinya kondisi wabah virus corona (Covid-19) di Malaysia
3. Pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Agustus 2021, Entitas Anak melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance untuk pembelian 2 (dua) unit Granmax dan 5 (lima) unit Wuling dengan jangka waktu masing-masing 48 bulan dan 60 bulan dan tingkat suku bunga tetap masing-masing sebesar 6,5% dan 5,85% per tahun.

Pada penelitian ini hanya akan membahas transaksi sewa yang dilakukan pada 31 Oktober 2021 yaitu perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance

Paragraf 53 PSAK 73, penyewa perlu melakukan pengungkapan atas transaksi sewanya. Pengungkapan ini berhubungan dengan penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 1. Pada laporan laba rugi, penyewa menyajikan beban sewa untuk transaksi yang dicatat sebagai sewa operasi. Untuk sewa pembiayaan, penyewa menyajikan beban penyusutan atas aset sewa guna usaha dan beban bunga liabilitas sewa guna usaha. Penyewa juga menyajikan dan mengungkapkan apabila terdapat pendapatan dari mensubsewakan aset sewa guna usaha serta keuntungan/kerugian dari transaksi jual dan sewa balik.

Berdasarkan PSAK 73, istilah sewa diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sewa operasi (*operating lease*) dan sewa pembiayaan (*finance lease*). Sewa operasi adalah sewa jangka pendek yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset, sedangkan sewa pembiayaan adalah sewa yang termasuk dalam bentuk pendanaan jangka panjang dan menyebabkan perpindahan risiko manfaat aset kepada penyewa. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa maka transaksi sewa dapat disebut sebagai pembelian secara angsuran (Martani, 2019). Sebelum menentukan perlakuan terhadap transaksi sewa bagi penyewa, perlu

dilakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai hal-hal yang menyebabkan suatu kontrak disebut sewa. Menurut Martani (2019), syarat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu kontrak mengandung sewa dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat aset identifikasian, baik ditetapkan secara eksplisit maupun implisit.
2. Penyewa memiliki hak secara substansial untuk memperoleh seluruh manfaat ekonomi atas penggunaan aset.
3. Penyewa mempunyai hak untuk menetapkan tujuan penggunaan aset.
4. Penyewa mempunyai hak untuk mengoperasikan aset. Dalam hal ini pesewa tidak mempunyai hak untuk menghalangi penyewa dalam menggunakan aset tersebut.

Tabel 4.21 Rincian Sewa

Tipe Pembiayaan	Sales and Lease
Harga Perolehan	Rp.946.677.749
Suku Bunga	6,5%-5,85%
Jangka Waktu	60 Bulan
Masa Manfaat	8 Tahun
Keterangan Tambahan	Personal Guarantee

Sumber: Data diolah Penulis, 2023

Pada transaksi pembayaran kredit dilakukan dengan sistem pembayaran *Balloon Payment*, Pada sistem pembayaran *Ballon Payment* perusahaan melakukan pembayaran kredit dengan skema pembayaran yang kecil di awal dan besar di akhir. di tahun 2021 jumlah pembayaran yang dilakukan sebesar Rp.147.567.655 dan nilai akumulasi penyusutan pada tahun 2022 sebesar Rp.48.476.936. metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Berikut disajikan akumulasi akumulasi penyusutan aset tetap sewaan pada PT Mustika Ratu Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 4.22 Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2019

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi penyusutan Rp
1	Mesin dan Peralatan Pabrik	1.480.000.000	209.666.667
	Jumlah	1.480.000.000	209.666.667

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Tabel 4.23 Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2020

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi penyusutan Rp
1	Mesin dan Peralatan Pabrik	1.480.000.000	209.666.667
	Jumlah	1.480.000.000	209.666.667

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Tabel 4.24 Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2021

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi penyusutan Rp
1	Mesin dan Peralatan Pabrik	1.480.000.000	357.666.66
	Jumlah	1.480.000.000	357.666.66

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Tabel 4.25 Pengungkapan Aset Sewaan PT Mustika Ratu Tbk Tahun 2022

No	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Rp	Akumulasi penyusutan Rp
1	Kendaraan	1.020.912.540	48.476.936
	Jumlah	1.020.912.540	48.476.936

Sumber: Data Sekunder, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penyajian dan pengungkapan aset sewaan pada PT Mustika Ratu Tbk. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset sewaan di PT Mustika Ratu Tbk dari tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa aset sewaan yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu berupa mesin dan peralatan pabrik dengan harga perolehan sebesar Rp.1.480.000.000 dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2019-2020 sebesar Rp. 209.666.667 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 357.666.66. aset sewaan PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2022 berupa kendaraan dengan harga perolehan sebesar 1.020.912.540 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.48.476.936.

PT Mustika Ratu harus mengakui aset hak guna pada biaya perolehan, yang mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset, dan estimasi biaya untuk membongkar dan mengembalikan aset ke kondisi semula jika ada kewajiban tersebut. Setelah pengakuan awal, aset hak guna diukur menggunakan model biaya, di mana aset hak guna disusutkan sepanjang umur manfaatnya atau selama jangka waktu sewa jika tidak ada jaminan bahwa aset akan dimiliki pada akhir jangka waktu sewa.

PT Mustika Ratu harus mengungkapkan deskripsi dan jumlah aset hak guna yang dimiliki. Ini termasuk informasi tentang jenis aset sewaan, jangka waktu sewa, dan nilai tercatat aset hak guna pada akhir periode pelaporan. Dengan mengikuti ketentuan ini, PT Mustika Ratu dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka memberikan gambaran yang akurat dan transparan mengenai aset tetap sewaan dan penyusutannya sesuai dengan PSAK 73.

4.2.3 Penyajian dan Pengungkapan Pajak Penghasilan Badan pada PT Mustika Ratu Tbk

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan mengikuti suatu standar akuntansi yang diterima secara umum dalam Menyusun laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan berbagai alasan, standar itu berbeda dengan ketentuan perpajakan yang juga memanfaatkan informasi akuntansi. Akibat adanya perbedaan beberapa hal dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, maka laba keuangan sebelum pajak (*pretax financial income*) atau laba untuk tujuan pembukuan berbeda

dengan laba kena pajak (*taxable income*) untuk tujuan perpajakan (Kusmala dan Hastoni, 2014).

Pajak ialah salah satu komponen pendapatan dalam berkontribusi terbesar untuk penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan bersumber dari pajak penghasilan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak terutang kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Perlakuan akuntansi pajak penghasilan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 (Isnayani, 2023)

Adanya perbedaan secara akuntansi dan secara perpajakan tentu akan mendatangkan perbedaan antara biaya pajak dengan hutang pajak yang disebut sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan yakni jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode selanjutnya karena akibat perbedaan temporer yang bisa dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan (Anggraini, 2018). Pajak kini ialah jumlah jumlah PPh terutang atas rugi pajak atas satu periode yang diatur dalam PSAK No. 46 (Isnayani, 2023).

Adanya kepatuhan membayar pajak baik entitas maupun pribadi akan berdampak pada kegiatan pembangunan nasional di Indonesia. Semakin taat kewajiban pembayaran pajak maka akan semakin berkembangnya sarana prasarana di Indonesia dan semakin meningkatnya kemakmuran warga negara.

Berdasarkan pada laporan laba rugi terdapat beban dan pendapatan selama tahun 2019-2021. Dalam melakukan kewajiban perpajakan perusahaan perlu melaksanakan koreksi fiskal. Dalam hal tidak mengalami kerugian, maka perusahaan harus membayar pajak dalam tahun pajak yang berjalan. Apabila perusahaan mengalami kerugian pada tahun berjalan maka rugi menjadi kompensasi kerugian yang bisa mengurangi laba dalam 5 tahun berikutnya berturut-turut sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Koreksi fiskal harus dilakukan sebab selain membayar pajak, perusahaan harus melaporkan sesuai dengan keadaan laba-rugi perusahaan yang diakui secara fiskal.

Tabel 4.26 Aset Pajak PT Mustika Ratu Tahun 2019-2020

Keterangan	2019 Rp	2020 Rp
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	<u>688.433.057</u>	<u>2.842.024.902</u>
Beda temporer		
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	394.560.419
Beban imbalan kerja	2.044.733.215	1.827.404.677
Pembayaran imbalan kerja	-724.399.742	-1.480.578.410
Beban Penyusutan	<u>317.900.233</u>	<u>737.634.949</u>
Jumlah beda temporer	1.638.233.706	1.479.021.635
Beda Tetap		
Jumlah beda tetap	2.688.542.202	2.150.182.508
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	<u>5.015.208.965</u>	<u>6.471.229.045</u>
Pajak kini tahun berjalan:		
Perusahaan	1.253.802.000	1.423.670.380
Entitas anak dalam negeri	1.381.403.000	1.625.228.440
Entitas anak luar negeri	-170.056.805	57.982.778
Pajak kini tahun-tahun sebelumnya:		
Perusahaan	-	238.004.125
Entitas anak dalam negeri	-	<u>6.149.876.375</u>
Jumlah beban pajak kini	<u>2.465.148.195</u>	<u>9.494.762.098</u>

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

Berdasarkan aset pajak PT Mustika Ratu tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa beban penyusutan PT Mustika Ratu pada tahun 2019 sebesar Rp.317.900.233 dan beban penyusutan PT Mustika Ratu pada tahun 2020 sebesar Rp. 737.634.949 dilakukan koreksi positif yang dapat mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak pada PT Mustika Ratu. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beban penyusutan yang tidak dapat dibiayakan diakibatkan dari beban penyusutan yang berasal dari aset tetap sewaan.

Tabel 4.27 Aset Pajak PT Mustika Ratu Tahun 2021-2022

Keterangan	2021 Rp	2022 Rp
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	<u>3.214.987.622</u>	<u>101.316.660.627</u>
Beda Tomporer		
Cadangan penurunan nilai piutang	1.816.816.635	8.231.790.819
Beban Penyusutan aset tetap	1.120.076.647	562.120.732
Beban imbalan kerja	-1.888.830.863	885.233.824
Pembayaran imbalan kerja	-341.698.480	-409.212.188
Cadangan penurunan nilai persediaan	<u>50.567.221</u>	-
Jumlah Beda temporer	756.931.160	9.269.933.187
Natura	-	200.954.044
Beban jamuan tamu, kesejahteraan karyawan, sumbangan dan lain-lain	171.984.713	119.003.540
Biaya Pajak	<u>1.068.645.655</u>	<u>477.399.214</u>
Jumlah Beda Tetap	1.235.538.320	-163.644.540.340
Taksiran penghasilan kena pajak perusahaan	<u>5.207.457.102</u>	<u>-53.057.946.526</u>
Taksiran penghasilan kena pajak perusahaan (pembulatan)	<u>5.207.457.000</u>	<u>-53.057.946.000</u>
Pajak kini tahun berjalan:		
Perusahaan	1.145.640.540	4.986.030.612
Etinitas anak dalam negeri	1.216.754.328	148.974.635
Etinitas anak luar negeri	12.766.593	20.606.170
Pajak kini tahun-tahun sebelumnya:		
Perusahaan	647.459.006	638.067
Etinitas anak dalam negeri	<u>2.380.548.658</u>	<u>26.120.144</u>
Jumlah beban pajak kini	<u>5.403.169.125</u>	<u>5.182.369.628</u>

Sumber: Data Sekunder, diolah 2024

Berdasarkan aset pajak PT Mustika Ratu tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa beban penyusutan PT Mustika Ratu pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.120.076.647 dan beban penyusutan PT Mustika Ratu pada tahun 2022 sebesar Rp. 562.120.732 dilakukan koreksi positif yang dapat mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak pada PT Mustika Ratu tahun 2021-2022. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beban penyusutan yang tidak dapat dibiayakan diakibatkan dari beban penyusutan yang berasal dari aset tetap sewaan.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Kusmala dan Hastoni (2014) dengan hasil PT. Mustika Ratu Tbk pada catatan atas laporan keuangan menyebutkan bahwa beban imbalan kerja yang diakui perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp2.972.421.266. Nilai tersebut merupakan liabilitas perusahaan yang masih terutang, sehingga akan meningkatkan kewajiban imbalan kerja PT Mustika Ratu Tbk. Dari nilai tersebut terdapat perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 1.620.902.539. Dengan kata lain terdapat selisih pengakuan atas kewajiban imbalan kerja. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan koreksi fiskal positif dimana akan menambah laba sebelum pajak penghasilan. Oleh karena itu menurut perpajakan nilai kewajiban imbalan kerja yang disetujui oleh DJP adalah sebesar Rp 1.351.518.727.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan pada penyajian dan pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung dengan menggunakan PSAK 16, perusahaan telah mengikuti aturan penerapan PSAK 16 pada saat menyajikan dan mengungkapkan aset tetap kepemilikan langsung.
2. Berdasarkan hasil analisis penyajian dan pengungkapan PSAK 73 pada sewa pembiayaan, Pada pelaporan dan pencatatan perjanjian sewa, perusahaan telah mencatat sesuai dengan ketentuan pada PSAK 73. Terlihat pada perjanjian sewa di atas 12 bulan di klasifikasikan sebagai aset sewaan, berdasarkan perpajakan sewa di klasifikasikan sebagai sewa dengan hak opsi.
3. Hasil analisis penelitian atas analisis penyajian dan pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung dan aset tetap sewaan beserta penyusutannya terhadap penyajian pajak penghasilan badan PT Mustika Ratu. Hasil perhitungan PPH badan dilakukan koreksi positif, yang menunjukkan bahwa terdapat beban penyusutan yang tidak bisa dibiayakan.

5.2 Saran

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini masih memiliki kekurangan yang bisa saja mempengaruhi hasil penelitian yaitu, tidak adanya data komitmen sewa operasi pada laporan keuangan dan kurangnya rincian-rincian data keuangan lainnya yang berhubungan dengan komitmen sewa operasi. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengumpulkan data komitmen sewa operasi secara langsung kepada perusahaan terkait sewa operasi yang benar-benar terjadi pada perusahaan tersebut sehingga hasil penelitian bisa lebih menggambarkan dampak yang terjadi atas penerapan PSAK 73 atas sewa.
2. Bagi PT Mustika Ratu Tbk
Hasil penelitian dapat memberi masukan kepada perusahaan dalam implementasi PSAK 16 atas penyajian dan pengungkapan aset tetap kepemilikan langsung dan penyajian dan pengungkapan aset tetap sewaan PSAK 73 atas transaksi sewa sesuai dengan ketentuan yang diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Estralita.(2013). *Akuntansi Perpajakan*.Jakarta: Salemba.
- Anthonis, Donal F. 2009. Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Agro Makmur Raya Medan. Skripsi. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Baridwan, Zaki. (2010). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi 5. Yogyakarta: BPPE.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairil, Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Desfika, Rama. 2010. Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. PLN (Persero) Cabang Nias. Skripsi. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Djajadiningrat. (2016). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Feldman, R. dan James, S. (2007). *The Text Mining Handbook*. New York: Cambridge
- Ginting, Kanilla Br. (2019). Analisis penyusutan aset tetap PSAK 16 Dan Peraturan Perpajakan dalam Menilai Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Pada PT Sahabat Mulia Jaya. Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Kencana.
- Hafsah. Dkk. (2015). Analisis Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Volume 15 No.1, hlm: 52-64.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. PSAK No. 16 Aset Tetap. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No. 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46: Akuntansi Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Narbuko dan Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purba, M. P. 2013. *Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mardjani, dkk. (2015). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Utama Karya Manado. *Jurnal Akuntansi* Volume 3 No 1 Halaman 951-1071. Tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7807>.
- Isnayani, Dea Nur. (2023). Kajian Implementasi Psak No. 46 Mengenai Pajak Penghasilan Dalam Persepektif Pengukuran, Pengakuan, Penyajian Dan Pengungkapan Atas Financial Statement Pt. Chandra Asri Petrochemical Rentang Waktu 2020-2022. *Jurnal Ekonomika*. Volume 10(2). Halaman 264-269.
- Kusmala, Rahmania dan Hastoni. (2014). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 2(1). Halaman 31-46.
- Martini, Dwi. Dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mayangsari, Anisa Putri dan Nurjanah, Yayuk. (2018). Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* ol. 6 No. 3, 2018 pg. 195-204.
- Mayangsari, Anisa Putri dan Nurjanah, Yayuk.(2018). Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture. *Jurnal Financial Statement and Fixed Assets*. Vol 6(3) Halaman 195-203.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks
- Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi. Ketiga. Yogyakarta: BPF*
- Ulfa, Elisa. (2019). Analisa Tax Planning dengan Pemberian Natura Untuk Meminimalisir Pajak Penghasilan Stdui Kasus pada CV.Karya Sentosa. *Jurnal Riset Mahasiswa*. Volume 19 (20054). Halaman 1-14.
- Ulhaq, Akhmad Ryan Dhiya. (2021). Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan Psak 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari

Sisi Penyewa. Jurnal Bidang Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
Vol.1(2) 84-108.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
Lembaran Negara No.246 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara No.
6736.

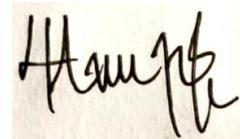
<https://mustika-ratu.co.id/investor-relations/annual-report/#>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leny Nopia
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 05 Februari 1999
Alamat : Kp. Cimanggu rt 001 rw 006 Desa Ciherang Kec.
Cibeber Kab. Lebak Banten
Agama : Islam
Usia : 24 Tahun
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 3 Cikotok
SMP : SMPN 1 Cibeber
SMA : SMK Muhammadiyah Cikotok
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 25 Juli 2024



Leny Nopia

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pengesahan Seminar Skripsi Penelitian

**ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP DAN
ASET SEWA PEMBIAYAAN BESERTA PENYUSUTANNYA
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN
PT MUSTIKA RATU TBK
TAHUN 2019-2022**

Proposal Penelitian
Telah diseminarkan dan dinyatakan lulus ✓
Pada Hari: Rabu 07 Juni 2023 ✓

Leny Nopia

022117139

Disetujui,

Dosen Penguji

(Dr. Asep Alipudin, SE., M. Ak., CSA.)

Ketua Komisi Pembimbing

(Chandra Pribadi, Ak, M. Si., CPSAK, CPA.)

Anggota Komisi Pembimbing

(Amelia Rahmi, S.E., M. Ak., AWP.)

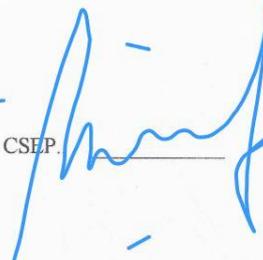


13/06/2023

Diketahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP,
QIA., CFE., CGCAE.)



Lampiran 2 Lembar Persetujuan Seminar Skripsi Penelitian

**ANALISIS PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP DAN
ASET SEWA PEMBIAYAAN BESERTA PENYUSUTANNYA
TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN
PT MUSTIKA RATU TBK
TAHUN 2019-2022**

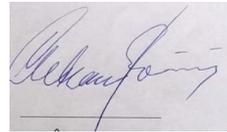
PROPOSAL PENELITIAN

Telah disetujui pada hari, Sabtu tanggal 13 Mei 2023 untuk diseminarkan

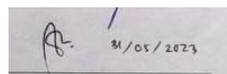
Leny Nopia
022117139

Disetujui,

Ketua Komisi Pembimbing
(Chandra Pribadi, Ak, M.Si., CPSAK, CPA)

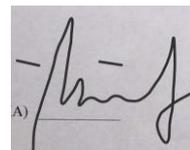


Anggota Komisi Pembimbing
(Amelia Rahmi, S.E., M. Ak., AWP)



Diketahui

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



Lampiran 3 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2019 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)	
	Catatan/ Notes	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5, 36	10.099.505.476	16.003.117.023
Piutang usaha - pihak ketiga	6, 35a, 36	214.230.984.938	192.679.159.586
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7, 35a, 36	20.534.938.159	17.639.870.282
Persediaan	8	128.353.150.403	126.358.482.691
Pajak dibayar dimuka	18a	3.956.195.699	5.548.324.048
Biaya dibayar dimuka	9	28.570.889.295	17.983.318.143
Uang muka pemasok dan lainnya	10	6.962.054.091	6.118.579.406
		412.707.718.061	382.330.861.179
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	11	54.872.479.523	59.744.095.869
Properti investasi	12	25.707.340.772	25.707.340.772
Uang jaminan - pihak berelasi	21, 35a, 36	2.020.250.761	2.089.304.506
Tagihan pajak penghasilan	18d	9.985.120.794	9.985.120.794
Aset pajak tangguhan	18f	9.545.501.796	9.726.298.749
Aset tidak lancar lainnya	13	17.924.536.288	22.304.771.998
		120.055.229.934	129.556.932.688
JUMLAH ASET		532.762.947.995	511.887.783.867
			TOTAL ASSETS

	Notes	2019	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	14a, 35c, 36	54.549.705.194	54.589.768.443	Short-term bank loan
Utang usaha - pihak ketiga	15, 35c, 36	37.670.738.643	39.894.673.698	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	16, 35c, 36	3.248.667.950	5.257.111.751	Other payables - third parties
Pinjaman pihak berelasi	21	29.602.226.758	19.100.588.759	Due to related parties
Utang pajak	18b	3.140.424.517	2.242.917.583	Taxes payable
Beban akrual	17, 35c, 36	11.761.824.192	851.731.991	Accrued expenses
Utang dividen	35c, 36	283.056.366	283.056.366	Dividends payable
Pendapatan diterima dimuka		2.214.560.090	55.000.028	Unearned revenue
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	14b, 35c, 36	-	50.620.638	Bank loan
Liabilitas sewa pembiayaan	19, 35c, 36	460.322.006	603.706.631	Finance lease liabilities
		<u>142.931.525.716</u>	<u>122.929.175.890</u>	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa pembiayaan	19, 35c, 36	309.726.923	628.694.093	Finance lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	20	20.880.170.306	20.355.917.104	Employee benefits liability
		<u>21.189.897.229</u>	<u>20.984.611.197</u>	
JUMLAH LIABILITAS		<u>164.121.422.945</u>	<u>143.913.787.087</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik - entitas induk				Equity attributable to owners of the parent company
Modal saham - nilai nominal Rp125 per lembar saham				Share capital - par value Rp125 per share
Modal dasar - 800.000.000 lembar saham				Authorized - 800,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428.000.000 lembar saham	22	53.500.000.000	53.500.000.000	Issued and fully paid-up capital - 428,000,000 shares
Tambahan modal disetor	23	56.710.000.000	56.710.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
- Telah ditentukan penggunaannya		13.748.488.606	13.748.488.606	- Appropriated
- Belum ditentukan penggunaannya		218.361.709.481	218.230.527.092	- Unappropriated
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		30.561.798.963	30.415.936.256	Exchange difference due to translation of financial statements
Penghasilan komprehensif lain		(4.290.563.796)	(4.680.483.191)	Other comprehensive income
Kepentingan non-pengendali		50.091.796	49.528.017	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>368.641.525.050</u>	<u>367.973.996.780</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>532.762.947.995</u>	<u>511.887.783.867</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 4 Laporan Laba Rugi tahun 2019

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2019 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)		
	Catatan/ Notes	2019	2018	
PENJUALAN - BERSIH	26, 34	305.224.577.860	300.572.751.733	SALES - NET
BEBAN POKOK PENJUALAN	27	(120.805.351.025)	(126.237.236.215)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		184.419.226.835	174.335.515.518	GROSS PROFIT
Beban penjualan	28	(127.264.471.191)	(121.854.966.846)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi (Rugi)/laba selisih kurs - bersih	29	(48.192.315.737) (1.071.885.602)	(43.793.006.242) 2.293.299.533	General and administrative expenses (Loss)/gain on foreign exchange - net
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	30	1.197.571.730	(3.391.029.512)	Other income/(expenses) - net
		(175.331.100.800)	(166.745.702.867)	
LABA USAHA		9.088.126.035	7.589.812.651	PROFIT FROM OPERATIONS
Beban keuangan	31, 34	(6.810.180.321)	(6.507.057.142)	Finance cost
Pendapatan keuangan	32, 34	151.592.505	794.345.026	Finance income
		(6.658.587.816)	(5.712.712.116)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		2.429.538.219	1.877.100.535	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH				INCOME TAX (EXPENSES) /BENEFIT - NET
Kini	18d	(2.465.148.195)	(2.036.563.500)	Current tax
Tangguhan	18e	167.446.644	(2.097.013.532)	Deferred tax
		(2.297.701.551)	(4.133.577.032)	
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN		131.836.668	(2.256.476.497)	PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		145.862.707	197.007.153	Exchange difference due to translation of financial statements
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Kontungan aktuarial		519.771.860	4.402.736.161	Actuarial gain
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya		(129.942.965)	(1.100.684.040)	Income tax relating to components of other comprehensive income
		389.828.895	3.302.052.121	
Jumlah penghasilan komprehensif lain		535.691.602	3.499.059.274	Total others comprehensive income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		667.528.270	1.242.582.777	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2020 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)	
	Catatan/ Notes	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5, 36	11.695.694.524	10.099.505.476
Piutang usaha - pihak ketiga	6, 35a, 36	215.136.542.425	214.230.984.938
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7, 35a, 36	20.631.042.568	20.534.938.159
Persediaan	8	146.622.901.883	128.353.150.403
Pajak dibayar dimuka	18a	568.059.217	3.956.195.699
Biaya dibayar dimuka	9	18.756.787.846	28.570.889.295
Uang muka pemasok dan lainnya	10	19.165.426.823	6.962.054.091
		432.576.455.286	412.707.718.061
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	11	55.965.014.371	54.872.479.523
Properti investasi	12	25.356.431.941	25.707.340.772
Uang jaminan - pihak berelasi	21, 35a, 36	2.001.573.293	2.020.250.761
Tagihan pajak penghasilan	18d, 18g	3.010.440.267	9.985.120.794
Aset pajak tangguhan	18f	11.416.364.209	9.545.501.796
Aset tidak lancar lainnya	13	29.469.658.084	17.924.536.288
		127.219.482.165	120.055.229.934
JUMLAH ASET		559.795.937.451	532.762.947.995
			ASSETS
			CURRENT ASSETS
			Cash and cash equivalents
			Trade receivables - third parties
			Other receivables - third parties
			Inventories
			Prepaid taxes
			Prepaid expenses
			Advances to suppliers and others
			NON-CURRENT ASSETS
			Property, plant and equipment - net
			Investment properties
			Security deposits - related party
			Claim for tax refund
			Deferred tax assets
			Other non-current assets
			TOTAL ASSETS

Lampiran 6 Laporan Laba Rugi tahun 2020

	Catatan/ Notes	2020	2019	
PENJUALAN - BERSIH	26, 34	318.408.499.475	305.224.577.860	SALES - NET
BEBAN POKOK PENJUALAN	27	(113.949.955.107)	(120.805.351.025)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		204.458.544.368	184.419.226.835	GROSS PROFIT
Beban penjualan	28	(132.164.370.165)	(127.264.471.191)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	29	(58.327.364.740)	(48.192.315.737)	General and administrative expenses
Rugi selisih kurs - bersih		(1.486.407.442)	(1.071.885.602)	Loss on foreign exchange - net
Pendapatan lain-lain - bersih	30	252.981.833	1.197.571.730	Other income - net
		(191.725.160.514)	(175.331.100.800)	
LABA USAHA		12.733.383.854	9.088.126.035	PROFIT FROM OPERATIONS
Beban keuangan	31, 34	(6.602.688.536)	(6.810.180.321)	Finance cost
Pendapatan keuangan	32, 34	48.467.955	151.592.505	Finance income
		(6.554.220.581)	(6.658.587.816)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		6.179.163.273	2.429.538.219	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH				INCOME TAX (EXPENSES)/ BENEFIT - NET
Kini	18d	(9.494.762.098)	(2.465.148.195)	Current tax
Tangguhan	18e	(3.451.121.066)	167.446.644	Deferred tax
		(12.945.883.164)	(2.297.701.551)	
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN		(6.766.719.891)	131.836.668	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(228.719.330)	145.862.707	Exchange difference due to translation of financial statements
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
(Kerugian)/keuntungan aktuaris		(124.158.839)	519.771.860	Actuarial (loss)/gain
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya		(144.328.766)	(129.942.965)	Income tax relating to components of other comprehensive income
		(268.487.605)	389.828.895	
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain		(497.206.935)	535.691.602	Total others comprehensive (loss)/ income
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(7.263.926.826)	667.528.270	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME FOR THE YEAR
PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME		
(lanjutan)		(continued)		
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020		For the Year Ended December 31, 2020		
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)		

	Catatan/ Notes	2020	2019	
(RUGI)/LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				(LOSS)/PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(6.766.209.786)	131.182.389	Owners of the parent entity
Keperentingan non-pengendali		(510.105)	654.279	Non-controlling interest
		(6.766.719.891)	131.836.668	
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE (LOSS)/PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(7.263.517.567)	666.964.491	Owners of the parent entity
Keperentingan non-pengendali		(409.259)	563.779	Non-controlling interest
		(7.263.926.826)	667.528.270	
(RUGI)/LABA PER SAHAM DASAR	24	(15,81)	0,31	BASIC (LOSS)/INCOME PER SHARE

Lampiran 7 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)	
	Catatan/ Notes	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan kas di bank	5, 36	8.693.405.081	11.695.694.524
Piutang usaha - pihak ketiga	6, 35a, 36	212.825.582.283	215.136.542.425
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7, 35a, 36	12.994.705.880	20.631.042.568
Persediaan	8	190.870.625.464	146.622.901.883
Pajak dibayar dimuka	18a	586.243.890	568.059.217
Biaya dibayar dimuka	9	17.926.775.887	18.756.787.846
Uang muka pemasok dan lainnya	10	15.441.291.055	19.165.426.823
		459.338.629.540	432.576.455.286
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	11	52.843.940.911	55.965.014.371
Properti investasi	12	27.256.431.941	25.356.431.941
Uang jaminan - pihak berelasi	21, 35a, 36	2.001.573.293	2.001.573.293
Tagihan pajak penghasilan	18d	-	3.010.440.267
Aset pajak tangguhan	18f	9.553.180.633	11.416.364.209
Aset tidak lancar lainnya	13	27.267.219.270	29.469.658.084
		118.922.346.048	127.219.482.165
JUMLAH ASET		578.260.975.588	559.795.937.451
			ASSETS
			CURRENT ASSETS
			Cash and cash in banks
			Trade receivables - third parties
			Other receivables - third parties
			Inventories
			Prepaid taxes
			Prepaid expenses
			Advances to suppliers and others
			NON-CURRENT ASSETS
			Property, plant and equipment - net
			Investment properties
			Security deposits - related party
			Claim for tax refund
			Deferred tax assets
			Other non-current assets
			TOTAL ASSETS

	Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	14, 35c, 36	87.163.161.804	80.747.427.391	<i>Short-term bank loans</i>
Utang usaha - pihak ketiga	15, 35c, 36	33.813.395.901	37.483.002.160	<i>Trade payables - third parties</i>
Utang lain-lain - pihak ketiga	16, 35c, 36	28.908.078.011	7.601.291.339	<i>Other payables - third parties</i>
Pinjaman pihak berelasi	21, 35c, 36	29.602.226.758	29.602.226.758	<i>Due to related parties</i>
Utang pajak	18b	18.634.242.854	11.613.789.686	<i>Taxes payable</i>
Beban akrual	17, 35c, 36	16.710.982.677	27.868.255.699	<i>Accrued expenses</i>
Utang dividen	35c, 36	283.056.366	283.056.366	<i>Dividends payable</i>
Pendapatan diterima dimuka		360.000.000	435.000.000	<i>Unearned revenue</i>
Liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	19, 35c, 36	147.567.655	167.363.932	<i>Current maturities of finance lease liabilities</i>
		215.622.712.026	195.801.413.331	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	19, 35c, 36	966.420.340	169.633.920	<i>Finance lease liabilities - net of current maturities</i>
Liabilitas imbalan kerja	20	18.475.914.725	21.406.284.723	<i>Employee benefits liability</i>
		19.442.335.065	21.575.918.643	
JUMLAH LIABILITAS		235.065.047.091	217.377.331.974	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik - entitas induk				<i>Equity attributable to owners of the parent entity</i>
Modal saham - nilai nominal				<i>Share capital - par value</i>
Rp125 per lembar saham				<i>Rp125 per share</i>
Modal dasar - 800.000.000 lembar saham				<i>Authorized - 800,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428.000.000 lembar saham	22, 35	53.500.000.000	53.500.000.000	<i>Issued and fully paid-up capital - 428,000,000 shares</i>
Tambahan modal disetor	23, 35	56.710.000.000	56.710.000.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
- Telah ditentukan penggunaannya		13.748.488.606	13.748.488.606	<i>- Appropriated</i>
- Belum ditentukan penggunaannya		192.998.505.131	192.640.378.200	<i>- Unappropriated</i>
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		30.676.236.474	30.333.079.633	<i>Exchange difference due to translation of financial statements</i>
Kerugian komprehensif lain		(4.483.013.171)	(4.559.152.247)	<i>Other comprehensive loss</i>
Kepentingan non-pengendali		45.711.457	45.811.285	<i>Non-controlling interest</i>
JUMLAH EKUITAS		343.195.928.497	342.418.605.477	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		578.260.975.588	559.795.937.451	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 8 Laporan Laba Rugi tahun 2021

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)		
	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENJUALAN - BERSIH	26, 34	326.794.571.097	318.408.499.475	SALES - NET
BEBAN POKOK PENJUALAN	27	(130.003.488.963)	(113.949.955.107)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		196.791.082.134	204.458.544.368	GROSS PROFIT
Beban penjualan	28	(132.466.346.156)	(132.164.370.165)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	29	(49.853.563.331)	(58.327.364.740)	General and administrative expenses
Rugi selisih kurs - bersih		(428.925.357)	(1.486.407.442)	Loss on foreign exchange - net
Pendapatan lain-lain - bersih	30	1.688.312.688	252.981.833	Other income - net
		(181.060.522.156)	(191.725.160.514)	
LABA USAHA		15.730.559.978	12.733.383.854	PROFIT FROM OPERATIONS
Beban keuangan	31, 34	(8.179.109.877)	(6.602.688.536)	Finance charge
Pendapatan keuangan	32, 34	37.211.268	48.467.955	Finance income
		(8.141.898.609)	(6.554.220.581)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		7.588.661.369	6.179.163.273	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH				INCOME TAX (EXPENSES)/ BENEFIT - NET
Kini	18d	(5.403.169.125)	(9.494.762.098)	Current tax
Tangguhan	18e	(1.827.982.693)	(3.451.121.066)	Deferred tax
		(7.231.151.818)	(12.945.883.164)	
LABA/ (RUGI) TAHUN BERJALAN		357.509.551	(6.766.719.891)	PROFIT/ (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		343.156.841	(228.719.330)	Exchange difference due to translation of financial statements
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan/(kerugian) aktuarial		97.623.882	(124.158.839)	Actuarial gain/(loss)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya		(21.477.254)	(144.328.766)	Income tax relating to components of other comprehensive income
		76.146.628	(268.487.605)	
Jumlah penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain		419.303.469	(497.206.935)	Total others comprehensive Income/ (loss)
JUMLAH LABA/ (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		776.813.020	(7.263.926.826)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/ (LOSS) FOR THE YEAR

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) For the Year Ended December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)		
	Catatan/ Notes	2021	2020	
LABA/ (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT/ (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		358.126.931	(6.766.209.786)	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(617.380)	(510.105)	Non-controlling interest
		357.509.551	(6.766.719.891)	
LABA/ (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME/ (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		777.422.848	(7.263.517.567)	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(609.828)	(409.259)	Non-controlling interest
		776.813.020	(7.263.926.826)	
LABA/ (RUGI) PER SAHAM DASAR	24	0,84	(15,81)	BASIC PROFIT/ (LOSS) PER SHARE

Lampiran 9 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022

PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2022 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)	
	Catatan/ Notes	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan kas di bank	5, 36	177.143.354.144	8.693.405.081
Piutang usaha - pihak ketiga	6, 35a, 36	166.316.482.373	212.825.582.283
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7, 35a, 36	10.579.327.128	12.994.705.880
Persediaan	8	206.648.966.313	190.870.625.464
Pajak dibayar dimuka	18a	625.140.057	586.243.890
Biaya dibayar dimuka	9	13.366.334.004	17.926.775.887
Uang muka pemasok dan lainnya	10	12.172.535.088	15.441.291.055
		586.852.139.107	459.338.629.540
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	11	49.266.249.003	52.843.940.911
Properti investasi	12	-	27.256.431.941
Uang jaminan - pihak berelasi	21, 35a, 36	2.001.573.293	2.001.573.293
Aset pajak tangguhan	18f	32.761.900.716	9.553.180.633
Aset tidak lancar lainnya	13, 36	23.898.735.680	27.267.219.270
		107.928.458.692	118.922.346.048
JUMLAH ASET		694.780.597.799	578.260.975.588
			ASSETS
			CURRENT ASSETS
			<i>Cash and cash in banks</i>
			<i>Trade receivables - third parties</i>
			<i>Other receivables - third parties</i>
			<i>Inventories</i>
			<i>Prepaid taxes</i>
			<i>Prepaid expenses</i>
			<i>Advances to suppliers and others</i>
			NON-CURRENT ASSETS
			<i>Property, plant and equipment - net</i>
			<i>Investment properties</i>
			<i>Security deposits - related party</i>
			<i>Deferred tax assets</i>
			<i>Other non-current assets</i>
			TOTAL ASSETS

	Catatan/ Notes	2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	14, 35c, 36	106.218.642.093	87.163.161.804	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	15, 35c, 36	24.311.214.595	33.813.395.901	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	16, 35c, 36	31.045.321.709	28.908.078.011	Other payables - third parties
Pinjaman pihak berelasi	21, 35c, 36	29.602.226.758	29.602.226.758	Due to related parties
Utang pajak	18b	24.217.763.224	18.634.242.854	Taxes payable
Beban akrual	17, 35c, 36	14.383.747.824	16.710.982.677	Accrued expenses
Utang dividen	35c, 36	283.056.366	283.056.366	Dividends payable
Pendapatan diterima dimuka		1.825.666.668	360.000.000	Unearned revenue
Liabilitas yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of liabilities:
Utang bank	14, 35c, 36	4.166.666.667	-	Bank loan
Sewa pembiayaan	19, 35c, 36	221.794.069	147.567.655	Finance lease
		<u>236.276.099.973</u>	<u>215.622.712.026</u>	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Non-current liabilities - net of current maturities:
Utang bank	14, 36	28.958.333.333	-	Bank loan
Sewa pembiayaan	19, 36	696.637.120	966.420.340	Finance lease
Liabilitas imbalan kerja	20	17.463.963.145	18.475.914.725	Employee benefits liability
		<u>47.118.935.598</u>	<u>19.442.335.065</u>	
JUMLAH LIABILITAS		<u>283.395.035.571</u>	<u>235.065.047.091</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik - entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value
Rp125 per lembar saham				Rp125 per share
Modal dasar - 800.000.000 lembar saham				Authorized - 800,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428.000.000 lembar saham	22	53.500.000.000	53.500.000.000	Issued and fully paid-up capital - 428,000,000 shares
Tambahan modal disetor	23	56.710.000.000	56.710.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
- Telah disetorkan penggunaannya		13.748.488.606	13.748.488.606	- Appropriated
- Belum disetorkan penggunaannya		260.831.516.181	192.998.505.131	- Unappropriated
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		29.819.536.752	30.676.236.474	Exchange difference due to translation of financial statements
Kerugian komprehensif lain		(3.248.806.937)	(4.483.013.171)	Other comprehensive loss
Kepentingan non-pengendali		24.827.646	45.711.457	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>411.385.562.228</u>	<u>343.195.928.497</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>694.780.597.799</u>	<u>578.260.975.588</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 10 Laporan Laba Rugi tahun 2022

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENJUALAN - BERSIH	26, 34	285.177.566.612	326.794.571.097	SALES - NET
BEBAN POKOK PENJUALAN	27	(148.294.315.695)	(130.003.488.963)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		136.883.250.917	196.791.082.134	GROSS PROFIT
Beban penjualan	28	(172.504.465.058)	(132.466.346.156)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	29	(63.814.070.665)	(49.853.563.331)	General and administrative expenses
Laba/ (rugi) selisih kurs - bersih		1.103.281.172	(428.925.357)	Profit/ (loss) on foreign exchange - net
Pendapatan lain-lain - bersih	30	158.915.058.330	1.688.312.688	Other income - net
		(76.300.196.221)	(181.060.522.156)	
LABA USAHA		60.583.054.696	15.730.559.978	PROFIT FROM OPERATIONS
Beban keuangan	31, 34	(11.732.865.228)	(8.179.109.877)	Finance charge
Pendapatan keuangan	32, 34	587.358.510	37.211.268	Finance income
		(11.145.506.718)	(8.141.898.609)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		49.437.547.978	7.588.661.369	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
MANFAAT/ (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH				INCOME TAX BENEFIT/ (EXPENSES) - NET
Kini	18d	(5.182.369.628)	(5.403.169.125)	Current tax
Tangguhan	18e	23.556.855.787	(1.827.982.693)	Deferred tax
		18.374.486.159	(7.231.151.818)	
LABA TAHUN BERJALAN		67.812.034.137	357.509.551	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(856.699.722)	343.156.841	Exchange difference due to translation of financial statements
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan aktuarial		1.582.435.020	97.623.882	Actuarial gain
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya		(348.135.704)	(21.477.254)	Income tax relating to components of other comprehensive income
		1.234.299.316	76.146.628	
Jumlah penghasilan komprehensif lain		377.599.594	419.303.469	Total others comprehensive income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		68.189.633.731	776.813.020	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ENTITAS ANAK				PT MUSTIKA RATU Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(lanjutan)				(continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022				For the Year Ended December 31, 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)				(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		67.833.011.050	358.126.931	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(20.976.913)	(617.380)	Non-controlling interest
		67.812.034.137	357.509.551	
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		68.210.517.542	777.422.848	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(20.883.811)	(609.828)	Non-controlling interest
		68.189.633.731	776.813.020	
LABA PER SAHAM DASAR	24	158,44	0,84	BASIC PROFIT PER SHARE

Lampiran 11 Aset Tetap Pada Laporan Keuangan

	2019					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi & efek translasi/ <i>Reclassification & translation effect</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Akumulasi penyusutan						<i>Accumulated depreciation</i>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Sewa tanah - jangka panjang	4.089.059.577	173.820.410	-	(113.897.913)	4.148.982.074	<i>Lease hold land - long term</i>
Bangunan dan prasarana	26.084.114.690	2.005.701.069	-	(90.574.786)	27.999.240.973	<i>Building and infrastructure</i>
Mesin dan peralatan pabrik	34.892.218.181	2.222.260.375	2.379.345.450	(335.884.382)	34.399.248.724	<i>Machinery and factory equipment</i>
Peralatan kantor	37.293.539.921	1.773.688.774	611.566.525	(27.817.196)	38.427.844.974	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	24.063.665.533	22.494.322	5.584.155.004	(25.862.343)	18.476.142.508	<i>Vehicles</i>
	126.422.597.902	6.197.964.950	8.575.066.979	(594.036.620)	123.451.459.253	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	-	-	-	209.666.667	209.666.667	<i>Machinery and factory equipment</i>
	126.422.597.902	6.197.964.950	8.575.066.979	(384.369.953)	123.661.125.920	
Nilai buku bersih	59.744.095.869				54.872.479.523	<i>Net book value</i>
	2018					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan						<i>Acquisition cost</i>
Tanah	11.090.469.852	-	-	-	11.090.469.852	<i>Land</i>
Sewa tanah - jangka panjang	16.808.034.590	795.674.340	-	-	17.603.708.930	<i>Lease hold land - long term</i>
Bangunan dan prasarana	44.630.657.672	602.088.758	-	-	45.232.746.430	<i>Building and infrastructure</i>
Mesin dan peralatan pabrik	43.121.508.774	2.178.201.837	-	-	45.299.710.611	<i>Machinery and factory equipment</i>
Peralatan kantor	41.357.450.980	1.175.773.516	-	-	42.533.224.496	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	24.661.978.729	359.140.516	614.285.793	-	24.406.833.452	<i>Vehicles</i>
	181.670.100.597	5.110.878.967	614.285.793	-	186.166.693.771	
Akumulasi penyusutan						<i>Accumulated depreciation</i>
Sewa tanah - jangka panjang	3.734.496.578	354.562.999	-	-	4.089.059.577	<i>Lease hold land - long term</i>
Bangunan dan prasarana	24.187.767.292	1.896.347.398	-	-	26.084.114.690	<i>Building and infrastructure</i>
Mesin dan peralatan pabrik	32.223.938.066	2.668.280.115	-	-	34.892.218.181	<i>Machinery and factory equipment</i>
Peralatan kantor	35.302.593.266	1.990.946.655	-	-	37.293.539.921	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	23.385.624.454	1.292.326.872	614.285.793	-	24.063.665.533	<i>Vehicles</i>
	118.834.419.656	8.202.464.039	614.285.793	-	126.422.597.902	
Nilai buku bersih	62.835.680.941				59.744.095.869	<i>Net book value</i>

2020						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi & efek translasi/ <i>Reclassification & translation effect</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan						Acquisition costs
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	11.090.469.852	-	-	-	11.090.469.852	Land
Sewa tanah - jangka panjang	17.117.480.298	-	-	479.047.456	17.596.527.754	Lease hold land - long term
Bangunan dan prasarana	45.726.837.689	3.542.799.831	-	209.898.943	49.479.536.463	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan pabrik	41.769.273.016	917.647.154	-	124.176.820	42.811.096.990	Machinery and factory equipment
Peralatan kantor	42.558.911.466	1.439.756.274	100.978.153	31.521.153	43.929.210.740	Office equipment
Kendaraan	18.790.633.122	124.070.850	2.076.532.305	31.572.044	16.869.743.711	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	-	108.716.365	-	-	108.716.365	Construction in progress
	177.053.605.443	6.132.990.474	2.177.510.458	876.216.416	181.885.301.875	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	1.480.000.000	-	-	-	1.480.000.000	Machinery and factory equipment
	178.533.605.443	6.132.990.474	2.177.510.458	876.216.416	183.365.301.875	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Sewa tanah - jangka panjang	4.148.982.074	176.758.190	-	117.058.067	4.442.798.331	Lease hold land - long term
Bangunan dan prasarana	27.999.240.973	1.486.477.998	-	93.433.986	29.579.152.957	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan pabrik	34.399.248.724	1.960.985.236	-	124.353.589	36.484.587.549	Machinery and factory equipment
Peralatan kantor	38.427.844.974	1.620.634.531	100.978.153	29.457.519	39.976.958.871	Office equipment
Kendaraan	18.476.142.508	132.719.544	2.076.532.305	26.793.386	16.559.123.133	Vehicles
	123.451.459.253	5.377.575.499	2.177.510.458	391.096.547	127.042.620.841	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	209.666.667	147.999.996	-	-	357.666.663	Machinery and factory equipment
	123.661.125.920	5.525.575.495	2.177.510.458	391.096.547	127.400.287.504	
Nilai buku bersih	54.872.479.523				55.965.014.371	Net book value

2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi & efek translasi/ <i>Reclassification & translation effect</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan						Acquisition costs
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	11.090.469.852	-	-	-	11.090.469.852	Land
Sewa tanah - jangka panjang	17.596.527.754	-	-	(381.380.937)	17.215.146.817	Lease hold land - long term
Bangunan dan prasarana	49.479.536.463	142.821.066	-	(167.105.482)	49.455.252.047	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan pabrik	42.811.096.990	612.831.973	3.322.920.916	1.410.351.431	41.511.359.478	Machinery and factory equipment
Peralatan kantor	43.929.210.740	780.948.061	9.868.800	(25.094.731)	44.675.195.270	Office equipment
Kendaraan	16.869.743.711	74.865.000	1.961.240.632	(25.135.246)	14.958.232.833	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	108.716.365	354.691.271	-	(32.263.636)	431.144.000	Construction in progress
	181.885.301.875	1.966.157.371	5.294.030.348	779.371.399	179.336.800.297	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	1.480.000.000	-	-	(1.480.000.000)	-	Machinery and factory equipment
Kendaraan	-	1.020.912.540	-	-	1.020.912.540	Vehicles
	183.365.301.875	2.987.069.911	5.294.030.348	(700.628.601)	180.357.712.837	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Sewa tanah - jangka panjang	4.442.798.331	176.112.414	-	(98.552.126)	4.520.358.619	Lease hold land - long term
Bangunan dan prasarana	29.579.152.957	2.028.915.267	-	(79.039.371)	31.529.028.853	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan pabrik	36.484.587.549	1.899.702.404	3.322.920.916	333.042.108	35.394.411.145	Machinery and factory equipment
Peralatan kantor	39.976.958.871	1.361.637.824	9.868.800	(24.053.299)	41.304.674.596	Office equipment
Kendaraan	16.559.123.133	141.726.004	1.961.240.632	(22.786.728)	14.716.821.777	Vehicles
	127.042.620.841	5.608.093.913	5.294.030.348	108.610.584	127.465.294.990	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Mesin dan peralatan pabrik	357.666.663	73.999.998	-	(431.666.661)	-	Machinery and factory equipment
Kendaraan	-	48.476.936	-	-	48.476.936	Vehicles
	127.400.287.504	5.730.570.847	5.294.030.348	(323.056.077)	127.513.771.926	
Nilai buku bersih	55.965.014.371				52.843.940.911	Net book value

2022						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi & efek translasi/ <i>Reclassification & translation effect</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan						Acquisition costs
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	11.090.469.852	-	-	-	11.090.469.852	Land
Sewa tanah - jangka panjang	17.215.146.817	-	-	706.297.671	17.921.444.488	Lease hold land - long term
Bangunan dan prasarana	49.455.252.047	-	-	309.470.667	49.764.722.714	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan pabrik	41.511.359.478	186.300.000	618.096.211	194.177.262	41.273.740.529	Machinery and factory equipment
Peralatan kantor	44.675.195.270	356.529.445	-	47.329.366	45.079.054.081	Office equipment
Kendaraan	14.958.232.833	10.300.000	-	46.549.169	15.015.082.002	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	431.144.000	-	39.000.000	-	392.144.000	Construction in progress
	179.336.800.297	553.129.445	657.096.211	1.303.824.135	180.536.657.666	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	1.020.912.540	-	-	-	1.020.912.540	Vehicles
	180.357.712.837	553.129.445	657.096.211	1.303.824.135	181.557.570.206	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Sewa tanah - jangka panjang	4.520.358.619	171.774.623	-	194.669.915	4.886.803.157	Lease hold land - long term
Bangunan dan prasarana	31.529.028.853	1.819.419.906	-	156.925.244	33.505.374.003	Building and infrastructure
Mesin dan peralatan pabrik	35.394.411.145	1.360.661.794	618.096.211	184.893.562	36.321.870.290	Machinery and factory equipment
Peralatan kantor	41.304.674.596	1.140.474.718	-	45.152.654	42.490.301.968	Office equipment
Kendaraan	14.716.821.777	106.021.378	-	45.499.604	14.868.342.759	Vehicles
	127.465.294.990	4.598.352.419	618.096.211	627.140.979	132.072.692.177	
Aset sewa pembiayaan						<u>Leased assets</u>
Kendaraan	48.476.936	170.152.090	-	-	218.629.026	Vehicles
	127.513.771.926	4.768.504.509	618.096.211	627.140.979	132.291.321.203	
Nilai buku bersih	52.843.940.911				49.266.249.003	Net book value